



**PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK  
PADA GEREJA KATOLIK  
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

**GREGORIUS SAINUDIN DUDY, S.Ag., S.H., M.H.**

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGARAN (PPRA) LXIII  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini dengan judul: PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK PADA GEREJA KATOLIK DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL. Penyusunan Taskap ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Adapun dasar penulisan Taskap ini adalah Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhanas RI.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Taskap ini tidak terlepas dari kerja sama dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lemhanas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXIII tahun 2022 di Lemhanas RI ini. Ucapan terima yang sama juga disampaikan kepada Tutor Taskap yakni bapak Marsda (Purn) Ade Dian Suryacandra, M.Sc, dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu, membimbing dan menguji Penulis hingga Taskap ini dinyatakan selesai dan sesuai ketentuan yang ditetapkan Lemhanas RI.

Dengan rendah hati, Penulis menantikan masukan dari berbagai pihak, demi penyempurnaan Taskap ini, karena Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Akhirnya, semoga Taskap ini berguna bagi Lemhanas RI dan setiap orang yang membacanya.

Jakarta, .....2022

Penulis,

GREGORIUS SAINUDIN DUDY, S.Ag., S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN

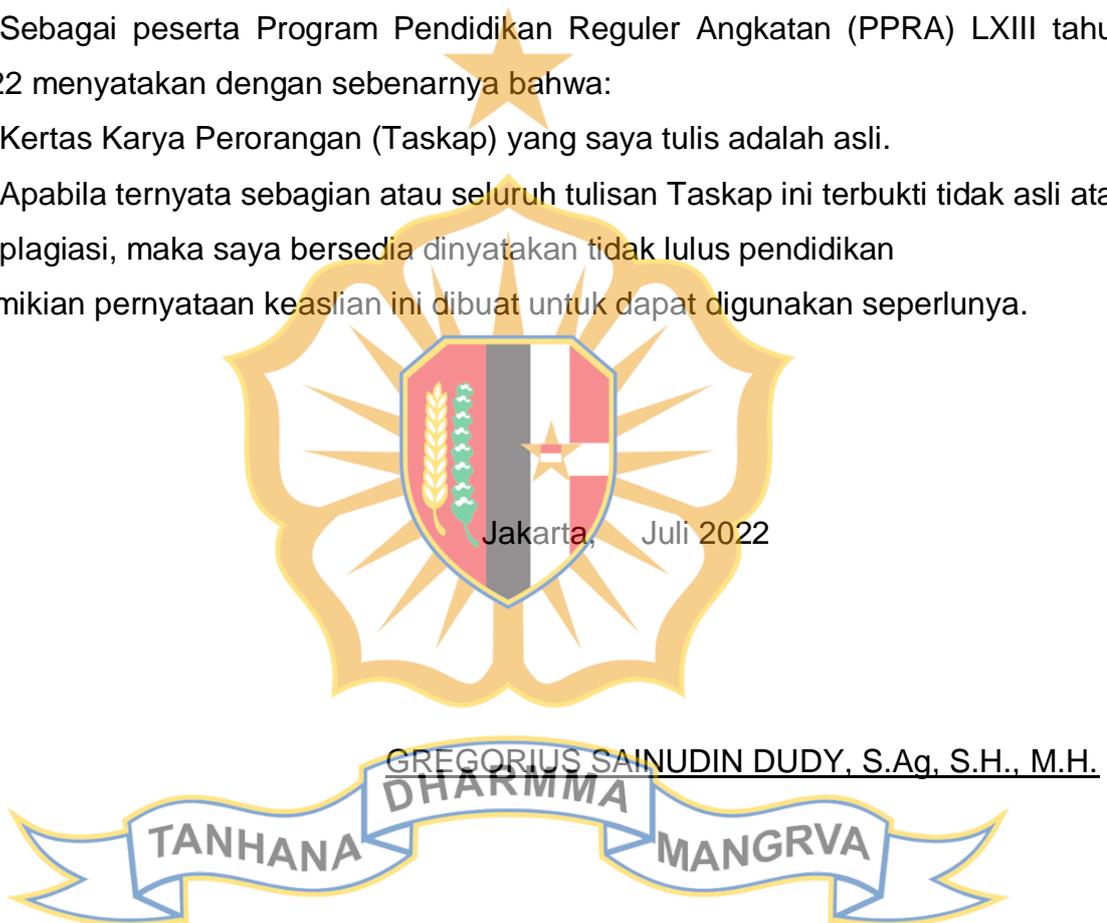
1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gregorius Sainudin Dudy, S. Ag., S.H., M.H.  
Pangkat : -  
Jabatan : Anggota Badan Pengurus Komisi Kerasulan Awam KWI.  
Instansi : Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).  
Alamat : Jl. Cikini II No. 10 Menteng, Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



## LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Tutor Taskap dari:

Nama : Gregorius Sainudin Dudy, S.Ag., S.H., M.H.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022

Judul Taskap : PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK PADA GEREJA KATOLIK DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai / tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhanas RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lemhanas RI Nomor 02 Tahun 2022, karena itu “layak / tidak layak” dan “disetujui / tidak disetujui” untuk diuji.

Jakarta, .....2022

Tutor Taskap

ADE DIAN SURYACANDRA, M.Sc  
MARSDA TNI (PURN)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	6
5. Metode dan Pendekatan.....	7
6. Pengertian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
7. Umum.....	13
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	13
9. Kerangka Teoritis.....	14
10. Data dan Fakta.....	17
11. Lingkungan Strategis.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
12. Umum.....	32
13. Analisis Pelaksanaan Pendidikan Politik Pada Gereja Katolik.....	32
14. Analisis Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Pada Gereja Katolik.....	44
15. Upaya Peningkatan Pendidikan Politik Pada Gereja Katolik.....	48
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
16. Simpulan.....	53
17. Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR LAMPIRAN:	
1. Alur Pikir.....	
2. Curriculum Vitae.....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Kehidupan politik yang sehat dan bermartabat merupakan salah satu aspek yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional suatu negara. Politik adalah salah satu aspek kehidupan berbangsa yang di satu pihak berkaitan dengan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, di pihak lain berkenaan dengan penyampaian kehendak rakyat sebagai wujud kedaulatan di tangan rakyat<sup>1</sup>. Pembangunan nasional di bidang politik pada hakikatnya merupakan upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar bangsa dapat berkembang dan maju. Untuk itu, diperlukan integrasi pemerintah dalam arti luas dan masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pencapaian ketahanan nasional yang tangguh, diperlukan suatu kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis, termasuk kemampuan menjaga stabilitas politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Stabilitas politik yang sehat dan dinamis tercermin dari adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat<sup>2</sup>. Dengan kata lain, untuk mencapai ketahanan politik, kehidupan bangsa harus menampakan perwujudan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik yang ditinjau dari nilai-nilai seperti: toleransi; transparansi hukum dan kelembagaan; kejujuran dan komitmen (bertindak berdasarkan kata-kata); dan etis berdasarkan konsensus<sup>3</sup>.

Fenomena politik bangsa Indonesia saat ini menghadirkan kondisi yang tidak mencerminkan pengamalan Pancasila sebagai paradigma politik bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat praktek intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, dalam hasil surveynya secara Nasional pada

---

<sup>1</sup> Hari Mulyono, dkk.2022. *Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, hlm. 68.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Fuguyama dalam Astrid S. Susanto Sunario, Pancasila (Untuk Abad ke-21), Jakarta, hlm.3 dalam Achmad Yulianto, dkk. *Bahan Ajar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar, Sub Bidang Studi Pancasila*2022. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, hlm. 64.

tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 63,07% guru yang berpandangan intoleran terhadap pemeluk agama lain. Sementara itu, survei Alvira Research Center tahun 2017 mencatat bahwa, Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila sebanyak 19,4% dan pegawai Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila sebanyak 9,1%<sup>4</sup>. Menurut survei yang dilakukan Wahid Institute, tren intoleransi dan radikalisasi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tren ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kontestasi politik, pidato atau ceramah yang mengandung ujaran kebencian, dan unggahan ujaran kebencian di sosial media. Kajian Wahid Institute menunjukkan bahwa, sekitar 0,4 % atau 600.000 (enam ratus ribu) Warga Negara Indonesia telah melakukan tindakan radikal; ada kelompok masyarakat yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh gerakan radikal yaitu dapat bertindak radikal apabila diajak atau diberi kesempatan, jumlahnya sekitar 11,4 juta orang atau 7,1%. Sementara itu, tindakan intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari 46% sebelumnya menjadi 54 % saat ini<sup>5</sup>. Hasil-hasil survey ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan politik bangsa, masih terdapat praktek-praktek intoleransi, radikalisme dan sikap penolakan terhadap ideologi Pancasila.

Sementara itu, dalam pelaksanaan proses demokrasi, yakni dalam proses pemilihan legislatif serta pemilihan kepala daerah, juga pemilihan presiden dan wakil presiden, masih terdapat kecurangan-kecurangan dan tidak adanya komitmen. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengenai tidak adanya komitmen dalam pemilu, dapat dilihat pada adanya masyarakat pemilih yang tidak mau menggunakan hak pilihnya yang biasa disebut golongan putih atau golput. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa, angka golput pada Pilpres 2004 sebesar 23,30%, 27, 5% pada 2009 dan 30, 2% pada 2014, sedangkan menurut Lingkaran survei Indonesia (LSI), pada Pilpres 2019, angka golput mencapai 19,24 %<sup>6</sup>. Sementara menyangkut kecurangan-kecurangan

<sup>4</sup> Tempo.Co.2022. Bamsoet Terima Buku KSAD Dudung Tentang Gerakan Intoleransi. <https://nasional.tempo.co/read/1556554/bamsoet-terima-buku-ksad-dudung-tentang-gerakan-intoleransi.2> Februari. diakses tanggal 3 Maret 2022, pukul 16.54 WIB.

<sup>5</sup> Lihat Media Indonesia.2020. Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/284269/survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>. 18 Januari. diakses tanggal 03 Maret 2022, pukul 17.01.

<sup>6</sup> BBC.Com. 2019. Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>. 3 Mei. diakses tanggal 03 Maret 2022, pukul 17.26 WIB.

dalam pemilu dapat diketahui melalui adanya praktek politik uang, kampanye hitam dan politik identitas. Berdasarkan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang pemilu tahun 2019 dan demokrasi di Indonesia, 47,7% penduduk membenarkan adanya politik uang pada pemilu serentak 2019, dan 46,7% masyarakat yang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang dapat dimengerti<sup>7</sup>. Selanjutnya, kampanye hitam sebagai jalan politik yang kotor masih marak terjadi dalam pesta demokrasi bangsa Indonesia. Misalnya, pada hajatan politik tahun 2019, peneliti Ahmad Khoirul Umam dari Lembaga Survey Indonesia memperkirakan bahwa kampanye hitam terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta politik identitas akan mewarnai pemilihan presiden 2019, sebab dianggap mampu mengeksploitasi dan mempengaruhi sensitifitas perilaku pemilih<sup>8</sup>.

Selain itu, menyangkut transparansi hukum dan moralitas kehidupan berbangsa, memperlihatkan angka korupsi semakin meningkat. Berdasarkan laporan LSM antikorupsi Indonesia *Corruption Watch* (ICW), korupsi yang menyebabkan kerugian negara meningkat 47,6%, yakni semester I tahun 2020 korupsi yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 18.173 triliun, meningkat menjadi Rp 26,83 triliun pada semester I tahun 2021<sup>9</sup>.

Melihat kenyataan tersebut, Gereja Katolik sebagai salah satu komponen bangsa turut bertanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat ketahanan bangsa di bidang politik. Sejak dahulu Gereja Katolik memiliki perhatian di bidang kehidupan politik. Melalui dokumen-dokumennya, Gereja Katolik mengajarkan dan menyerukan mengenai masalah-masalah politik dunia. Misalnya, dalam Konsili Vatikan II tentang *Gaudium et Spes* artikel 75, dibicarakan mengenai hubungan politik dan iman Kristiani. Di dalamnya dikatakan bahwa semua kekuasaan harus digunakan demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau partai<sup>10</sup>. Terdapat juga dalam dokumen Gereja Katolik lainnya, yaitu artikel 46

<sup>7</sup> Fortunatus Hamsah Manah. 2021. Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum. <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>. 25 Juni. diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 11.51 WIB.

<sup>8</sup> BBC News Indonesia. 2018. Pilpres 2019: 'Kampanye Hitam SARA masih Ampuh untuk Mengeksploitasi Perilaku Pemilih'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45629345>. 25 September. diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 12.51 WIB.

<sup>9</sup> Faisal Javier.2021. ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya. <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>. 14 September. diakses tanggal 15 Februari 2022, pukul 12.25 WIB.

<sup>10</sup> Bdk. R. Hardawiryana (Penerj.). Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2002, hlm. 373.

*Ensiklik Octogesima Adveniens* dari Paus Paulus VI tahun 1971, menekankan bahwa tugas politik adalah memecahkan masalah hubungan antar manusia, dan bahwa umat Kristiani diundang untuk berpartisipasi di dalamnya dan membuat pilihannya sesuai dengan Injil<sup>11</sup>.

Dalam praksis pastoral, pelayanan di bidang politik dijalankan oleh Komisi Kerasulan awam, yang menurut Anggaran Dasar Konferensi Waligereja Indonesia, komisi ini berfungsi untuk<sup>12</sup>: pertama, membantu dan mendorong umat Katolik di mana pun untuk menemukan dan semakin menghayati spiritualitas kerasulan awam dalam tugas perutusannya, pekerjaan dan profesi mereka; kedua, meningkatkan kesadaran umat akan panggilannya sebagai anggota Gereja Katolik dan sebagai warga negara Indonesia untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat dan menggereja dalam semangat iman kristiani. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, keterlibatan Gereja dalam hal ini umat katolik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah suatu keharusan karena merupakan tanggung jawab misi dan panggilan iman semua anggota Gereja. Hal ini ditegaskan oleh *Cardinal O' Connors*, bahwa jika umat Katolik tidak terlibat dalam kehidupan politik atau walaupun terlibat tetapi tidak menyuarakan dan menegakkan moral dan spiritualitas Katolik, maka Gereja harus merasa dirinya gagal menjalankan misinya<sup>13</sup>. Hal senada mengenai pentingnya warga Gereja terlibat dalam kehidupan politik bangsa, juga ditegaskan Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, bahwa orang-orang Katolik harus terlibat dan berjuang dalam politik, karena hal itu merupakan wujud tertinggi dari cinta kasih, sejauh berpolitik itu tertuju pada pencapaian kesejahteraan umum. Kendati politik itu sedemikian kotornya, orang Katolik harus terlibat ke dalamnya” (1 Mei 2015)<sup>14</sup>. Keterlibatan umat katolik sebagaimana dijelaskan di atas, tidak lain tidak bukan hanya untuk memperjuangkan kebaikan umum (*bonum commune*) yang adalah tujuan politik (bdk. Kan. 747, art. 2). Selanjutnya dalam cara berpolitiknya, umat katolik harus dijiwai atau diwarnai oleh nilai-nilai Injili (bdk. Kan. 747, art. 1). Nilai-nilai Injil yang dimaksud adalah: 1) inklusif (*non diskriminatif*); 2) *Preferential*

<sup>11</sup> Bdk. Ibid. hlm. 476.

<sup>12</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, Himpunan Direktorium Komisi, Lembaga, Sekretariat, Departemen Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal KWI, 2000, hlm. 69.

<sup>13</sup> Hipolitus K. Kewuel dan Gabriel Sunyoto (Editor).2010. 12 Pintu Evangelisasi Menebar Garam di Atas Pelangi: 50 Tahun Widya Yuwana Madiun. Madiun: Wina Press. hlm. 180.

<sup>14</sup> Konferensi Waligereja Indonesia.2017. *Nota Pastoral KWI 2017: Mencegah dan Memberantas Korupsi*, artikel 26, Jakarta: DokPen KWI.

*Option for the poor*, 3) Hak Asasi Manusia (HAM); 4) Solidaritas dan Subsidiaritas; dan 5) *Bonum publicum/bonum commune*<sup>15</sup>.

Di Indonesia, pendidikan politik pada Gereja katolik ini sangat memungkinkan, karena Gereja Katolik memiliki struktur yang baku dan ada hierarki yang dibantu Komisi Kerasulan Awam yang bertanggung jawab. Terdapat 37 Keuskupan yang tersebar di Indonesia yang melayani 8,42 juta jiwa atau 3,09% (per Juni 2021)<sup>16</sup> penduduk Indonesia. Oleh karena itu, di tengah kehidupan politik bangsa yang masih ditandai dengan adanya kehidupan politik yang tidak sehat dan mengancam ketahanan nasional di bidang politik tersebut, Gereja harus hadir membawa kesejukan dan bermartabat dengan mengupayakan menampilkan nilai-nilai universal seperti menjunjung tinggi hak asasi manusia, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan persatuan bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Gereja memandang perlu untuk melakukan pendidikan politik bagi kader-kader katolik yang akan terjun ke dunia politik. Melalui pendidikan politik pada Gereja Katolik tersebut diharapkan menghasilkan kader-kader yang menjadi teladan dalam menampilkan perpolitikan yang sehat dan bermartabat. Dengan adanya menciptakan kehidupan politik yang sehat dan bermartabat akan mendukung penguatan Ketahanan Nasional.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam Taskap ini adalah Bagaimana Peran Gereja Katolik Melaksanakan Peningkatan Pendidikan Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional?

Dari rumusan tersebut di atas, maka diperoleh pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan dijawab pada bab-bab berikutnya, yakni:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Politik Pada Gereja Katolik?
- b. Bagaimana Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik pada Gereja Katolik?
- c. Bagaimana Upaya Peningkatan Pendidikan Politik Pada Gereja Katolik?

<sup>15</sup> D. Gusti Bagus Kusumawanta, *Gereja dan Politik*. 2007. <https://www.mirifica.net/2007/03/08/gereja-dan-politik/>, 8 Maret. diakses tanggal 24 April 2022, pukul 23.41 WIB.

<sup>16</sup> Viva Budy Kusnandar. 30 September 2021. Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan,mayoritas%20penduduk%20Indonesia%20adalah%20muslim.> Diakses tanggal 07 Agustus 2022, pukul 15:36 WIB.

### 3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penulisan Kartas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pendidikan politik dalam Gereja Katolik dalam rangka penguatan Ketahanan Nasional.
- b. Tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) adalah sebagai sumbangan pemikiran secara konseptual dan strategis kepada pihak terkait khususnya bagi pimpinan Gereja Katolik di Indonesia untuk mengambil kebijakan mengenai pendidikan politik bagi umatnya agar perkuat Ketahanan Nasional bidang politik.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Taskap ini hanya dibatasi pada pelaksanaan pendidikan politik dalam Gereja Katolik Indonesia dalam rangka penguatan Ketahanan Nasional.

- b. Sistematika.

Penulisan Taskap ini didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

- 1) BAB I PENDAHULUAN. Bab I ini berisi tentang latar belakang peran Gereja Katolik melaksanakan pendidikan politik dalam rangka Ketahanan Nasional; rumusan masalah; maksud dan tujuan penulisan; ruang lingkup dan sistematika penulisan; metode dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan; serta pengertian-pengertian terkait penulisan Taskap ini.
- 2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini dijelaskan tentang Peraturan Perundang-Undangan terkait Kerangka Teoritis; data dan fakta; serta lingkungan strategis yang mendukung tulisan dan informasi lainnya yang akan dianalisis pada bab III.
- 3) BAB III PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang pembahasan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah dan data dan fakta pada bab II dengan mencari dan menemukan faktor penyebabnya dan pemecahan masalah atau solusinya.
- 4) BAB IV PENUTUP. Pada bab ini penulis menguraikan tentang simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan ringkasan mengenai temuan berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulisan Taskap ini. Sedangkan rekomendasi merupakan saran dari penulis yang dialamatkan

kepada para pemangku kepentingan terkait permasalahan yang dikaji dalam Taskap ini.

## 5. Metode dan Pendekatan

### a. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan kertas karya perorangan (Taskap) ini adalah metode analisis kualitatif/deskriptif. Metode ini menekankan pengolahan data secara mendalam berdasarkan data hasil pengamatan, wawancara dan literatur.

### b. Pendekatan

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan perspektif kepentingan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu berdasarkan kerangka teoritis yang digunakan.

## 6. Pengertian

### a. Pendidikan Politik

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan pendidikan politik. Menurut Alfian, pendidikan politik merupakan usaha untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun<sup>17</sup>. Rusadi Kantaprawira berpendapat bahwa pendidikan politik adalah upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar secara maksimal, mereka dapat berpartisipasi dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi<sup>18</sup>. Kartini Kartono mengartikan pendidikan politik sebagai upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu supaya mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik<sup>19</sup>. Sedangkan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia, yakni: dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan

<sup>17</sup> Alfian.1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia. hlm. 235.

<sup>18</sup> Rusadi Kantaprawira.2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 55.

<sup>19</sup> Kartini Kartono.1996. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 64.

pemahaman tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian yang sama juga diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

b. Gereja Katolik

Gereja berasal dari kata bahasa Yunani *ekklesia* yang berarti 'memanggil', maka Gereja diartikan sebagai umat yang dipanggil Tuhan<sup>20</sup>. Dalam perkembangannya, Gereja Katolik dipahami sebagai kumpulan jemaat yang terdiri dari orang-orang yang telah dibaptis, yang disatukan dalam iman sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen-sakramen yang sama, di bawah otoritas Paus dan Para Uskup dalam persekutuannya dengan Paus<sup>21</sup>.

c. Hierarki

1) Pengertian

Hierarki merupakan kata bahasa Yunani *hierarchy*, yang terdiri dua kata yaitu *hieros* artinya jabatan dan *archos* artinya suci. Dengan demikian, hierarki berarti jabatan suci. Dalam Gereja Katolik, hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat tahbisan suci. Dalam tahbisan suci tersebut ada tingkatannya, yaitu Tahbisan Uskup, Tahbisan Imam dan Tahbisan Diakon. Mereka itulah yang disebut hierarki karena mendapat wewenang untuk pelayanan penggembalaan Gereja. Namun dalam perkembangannya, secara umum hierarki diartikan sebagai tata susunan<sup>22</sup>.

2) Struktur Hierarki (Kepemimpinan) Gereja Katolik

Secara struktural, kepemimpinan dalam Gereja Katolik diurutkan sebagai berikut:

a) Dewan Para Uskup yang dipimpin Paus.

Anggota dewan para Uskup adalah seluruh Uskup di dunia yang diketuai oleh Paus. Setiap kali seorang Imam ditahbiskan menjadi Uskup, akan segera menjadi dewan para Uskup<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Konferensi Waligereja Indonesia. 1996. *Iman Katolik*. Jakarta: Obor. hlm. 332.

<sup>21</sup> Katolisistas.org., Apa Arti Gereja?, <https://katolisitas.org/unit/apakah-arti-gereja/>, diakses tanggal 30 Maret 2022, pukul 21.46 WIB.

<sup>22</sup> Iman Katolik, Hierarki Gereja Katolik, <https://www.imankatolik.or.id/hierarki.html>, bdk. Paroki Santo Yosep Purwokerto, Hirarki Dalam Gereja Katolik, 15 Juli 2018, <https://sanyospwt.com/2018/07/15/hirarki-dalam-gereja-katolik/>, diakses tanggal 04 Agustus 2022, pukul 09.45 WIB.

<sup>23</sup> R. Hardawiryana (Penerj.). 1993. Dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium Art. 22. Jakarta: Dokpen KWI.

## b) Paus

Paus adalah pimpinan Gereja Keuskupan Agung Roma. Dalam hal ini Paus sama dengan Uskup lain di dunia. Namun karena Paus adalah ketua kolegialitas para Uskup se-dunia, maka Paus juga menjadi kepala Gereja Universal dan pemimpin tertinggi Gereja Katolik seluruh dunia.

## c) Uskup

Uskup adalah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima tahbisan tingkat ketiga. Tugas pokok seorang Uskup di tempatnya adalah Pemersatu, yaitu mempersatukan dan mempertemukan umat<sup>24</sup>. Uskup adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik di sebuah Keuskupan.

## d) Imam

Imam adalah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima tahbisan suci tingkat kedua. Imam ditahbiskan oleh Uskup untuk menjadi pembantunya atau rekan kerjanya dalam pengajaran iman dan pelayanan sakramen-sakramen serta dapat menjadi wakilnya. Seorang Imam dapat ditentukan Uskup untuk menjadi kepala Paroki tertentu.

## e) Diakon

Diakon adalah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima tahbisan tingkat pertama. Diakon adalah rekan kerja dan pembantu khusus Uskup dalam pelayanan sakramen tetapi belum boleh mewakili Uskup dan menjabat sebagai kepala sebuah Paroki.

## d. Kaum Awam

Istilah awam berasal dari kata bahasa Yunani *laikos* yang berarti bukan ahli. Dalam lingkungan Gereja Katolik, kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk golongan yang menerima tahbisan suci. Artinya kaum awam adalah mereka yang bukan hierarki dalam Gereja Katolik. Kaum awam dalam Gereja Katolik dikelompokkan menjadi dua, yaitu kaum awam khusus dan biasa. Kaum awam khusus adalah mereka yang tidak menerima tahbisan suci tetapi mengikrarkan kaul kebiaraan sebagai biarawan dan

<sup>24</sup> Ibid., art. 27.

biarawati. Sedangkan kaum awam biasa adalah mereka yang tidak menerima tahbisan suci dan bukan biarawan-biarawati<sup>25</sup>.

e. Konferensi Waligereja Indonesia

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) adalah federasi para Waligereja (Uskup) se-Indonesia yang mempunyai tujuan menggalang kerjasama dan persatuan dalam tugas pastoralnya dalam memimpin umat Katolik Indonesia. KWI tidak membawahi atau berada 'di atas' para Uskup karena masing-masing Uskup tetap otonom. Keanggotaan KWI terdiri dari 37 orang Uskup sesuai dengan jumlah Keuskupan di Indonesia sekarang ini. Setiap Uskup, karena tahbisannya otomatis menjadi bagian dari jajaran para Uskup se-dunia (*Collegium Episcopale*) yang dalam kesatuannya dengan para Uskup se-dunia di bawah pimpinan Sri Paus, bertanggung jawab atas seluruh Gereja Katolik. Para Uskup dalam suatu negara, secara bersama membentuk suatu wadah kerja sama yang dinamakan Konferensi Para Uskup. Dalam wadah itu, para Uskup bekerja sama merundingkan dan memutuskan sesuatu mengenai umat Katolik di negara tersebut. Seorang Uskup adalah pimpinan Gereja setempat yang bernama Keuskupan, maka disebut juga Waligereja. Oleh karena itu, konferensi para Uskup se-Indonesia disebut Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) yang kemudian diubah menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)<sup>26</sup>.

f. Komisi Kerasulan Awam KWI

Komisi Kerasulan awam KWI merupakan Komisi yang dibentuk oleh KWI sebagai ungkapan dan rasa perhatian pelayanan KWI atas kerasulan awam, tanpa pretense mewakili kaum awam atau bertindak atas nama orang atau kelompok awam Katolik. Komisi ini bertugas untuk membantu memajukan spiritualitas Kerasulan Awam, menganimasi kesadaran dan motivasi orang-orang Katolik baik perorangan maupun kelompok untuk lebih menghayati partisipasinya dalam tugas perutusan Kristus dalam lingkup Gereja maupun

<sup>25</sup> Lihat R. Hardawiryana (Penerj.). 1993. Dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium Art. 31. Jakarta: Dokpen KWI; bdk. Kompasiana.Com, Mengenal Kaum 'Awam' Dalam Gereja Katolik, 11 Oktober 2021, [https://www.kompasiana.com/yulius88910/6163c75e259d5c20984d7592/mengenal-kaum-awam-dalam-gereja-atolik?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/yulius88910/6163c75e259d5c20984d7592/mengenal-kaum-awam-dalam-gereja-atolik?page=2&page_images=1), diakses tanggal 04 Agustus 2022, pukul 10.31 WIB.

<sup>26</sup> Lihat Kantor Waligereja Indonesia (kawali), Profil KWI, <https://www.kawali.org/profil-kwi/>, diakses tanggal 04 Agustus 2022, pukul 11.04 WIB; Bdk. Statuta Konferensi Waligereja Indonesia.

dan terutama dalam tata dunia, yaitu menjadi terang dan garam dunia<sup>27</sup>. Komisi ini juga terdapat di tingkat Keuskupan-Keuskupan dengan nama Komisi Kerasulan Awam Keuskupan dengan tugas yang sama sebagaimana ditentukan untuk Komisi Kerasulan Awam KWI. Sedangkan di tingkat Paroki, tugas komisi ini dijalankan oleh Seksi Kerasulan Awam.

g. Keuskupan

Keuskupan atau Diosis adalah daerah gerejawi di bawah kuasa seorang Uskup. Hukum Gereja Katolik Roma menetapkan keuskupan sebagai golongan umat Katolik yang tinggal dalam suatu daerah dengan batas-batas tertentu dengan seorang Uskup yang mengambil alih peranan Yesus Kristus dalam mempersatukan mereka sebagai guru dalam ajaran, mengetuai dalam ibadat suci dan pelayan dalam kepemimpinan. Keuskupan juga disebut Gereja Partikular dalam relasi dengan Gereja Universal yang dipimpin Paus. Hanya Paus yang berwenang untuk mendirikan suatu Keuskupan setelah mendengarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Uskup di daerah itu<sup>28</sup>.

h. Paroki

Paroki merupakan jemaat tertentu kaum beriman kristiani yang dibentuk secara tetap dalam Gereja Partikular dan yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup Diosesan dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri. Umumnya suatu keuskupan dibagi dalam daerah paroki lebih kecil yang mana Uskup dibantu Pastor Paroki dalam melaksanakan tugas pemersatu, sebagai guru ajaran, imam dalam ibadat dan pelayan dalam kepemimpinan. Pembentukan suatu Paroki dengan batas-batasnya serta Pastor Parokinya ditetapkan hanya ditetapkan oleh Uskup setempat setelah mendengar usulan dari imam atau imam-imam di wilayah tersebut dan Dewan Konsultores Uskup<sup>29</sup>.

i. Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan

<sup>27</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, 2000, Himpunan Direktorium Komisi, Lembaga, Sekretariat, Departemen KWI, Jakarta: Sekretariat Jenderal KWI, hlm. 68.

<sup>28</sup> Konferensi Waligereja Indonesia. 2006. Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), kanon: 368, 369, 372 dan 373 Jakarta: DokPen KWI; bdk. <https://ms.wikipedia.org/wiki/Keuskupan>.

<sup>29</sup> Lihat, Ibid., kanon 515 art. 1; bdk. Gereja Katolik Paroki Cengkareng, Apa Itu Paroki?, 2 Februari 2009, <https://trinitas.or.id/gereja-dan-paroki/121-apa-itu-paroki.html>, diakses tanggal 04 Agustus 2022, pukul 12.01 WIB.

dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG), baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya<sup>30</sup>.



---

<sup>30</sup>Hari Mulyono, dkk.2022. Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Hlm. 45.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum

Dalam latar belakang yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, ditemukan permasalahan di bidang politik yang dihadapi bangsa Indonesia. Permasalahan dalam bidang politik tersebut diupayakan penyelesaiannya melalui pendidikan politik. Upaya pendidikan politik yang dibahas adalah pendidikan politik pada kalangan Gereja Katolik dalam kaitannya dengan Negara Indonesia. Hal yang disoroti adalah pendidikan politik pada kalangan Gereja Katolik karena Gereja Katolik merupakan lembaga keagamaan yang tidak terpisahkan dari Negara Indonesia dan diakui secara resmi keberadaannya oleh Negara.

Maka, sebelum membahas upaya pendidikan politik pada Gereja Katolik dalam kaitannya dengan negara tersebut, pada Bab II ini akan menjelaskan beberapa konsep lengkap dengan berbagai referensi yang akan digunakan sebagai literatur atau rujukan ilmiah dan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Konsep tersebut adalah mengenai peraturan perundang-undangan terkait pendidikan politik; kerangka teoritis yang merupakan semacam alat untuk mengkaji atau membedah permasalahannya dan mencari solusi; data dan fakta yang menunjukkan bukti-bukti aktual menyangkut permasalahan yang ada; serta lingkungan strategis yang menampilkan kondisi-kondisi yang menjadi pertimbangan untuk dilaksanakannya pendidikan politik.

### 8. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan terkait Pendidikan politik yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang (UU) Tentang Partai Politik (Parpol) ini mengatur bahwa Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Parpol diutamakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat (Pasal

- 34 Ayat 3a). Adapun pendidikan politik tersebut berkaitan dengan kegiatan: pendalaman mengenai empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika politik dan budaya politik, serta; pengkaderan anggota Parpol secara berjenjang dan berkelanjutan (Pasal 3b).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Mengenai bantuan keuangan kepada parpol diperuntukan kegiatan pendidikan politik ditegaskan lagi dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) ini bahwa, bantuan keuangan kepada Parpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol.
- c. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda
- Menurut Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda, "Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha demi meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien".
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mengatur tentang Tujuan, Sasaran, Prinsip, Ruang Lingkup, Kegiatan Fasilitasi dan Kelompok Sasaran terkait kegiatan Pendidikan Politik serta Materi Pendidikan Politik.

## 9. Kerangka Teoritis

Dalam menyelesaikan Taskap ini, ada beberapa teori yang digunakan penulis, yaitu:

- a. Ajaran Gereja Katolik tentang Keterlibatan Orang Katolik di Bidang Politik ditentukan dalam beberapa Dokumen Gereja, antara lain:

### 1) *Gaudium et Spes*

Dalam artikel 75 Dokumen Konsili Vatikan II tentang *Gaudium et Spes*, para Uskup menyetakan bahwa, “Hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik, yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda, supaya semua warga negara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara. Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik, yang sukar dan sekaligus amat luhur, dan berusaha mengamalkannya, tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil. Hendaknya mereka dengan keutuhan kepribadiannya dan kebijaksanaannya menentang ketidakadilan dan penindasan, kekuasaan sewenang-wenang dan sikap tidak bertenggang rasa satu orang atau satu politik. Hendaknya mereka secara jujur dan wajar, malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang”<sup>31</sup>.

### 2) *Centesimus Annus*

Dalam artikel 46 Ensiklik *Centesimus Annus* dikatakan bahwa, “Gereja menghargai sistem demokrasi karena membuka wewenang yang luas bagi warga negara untuk berperan serta dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik, lagi pula memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin, tetapi juga meminta pertanggungjawaban dari mereka, dan bila itu memang sudah selayaknya menggantikan mereka melalui cara-cara damai”<sup>32</sup>.

### b. Teori Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik mengandung arti bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah<sup>33</sup>:

- 1) Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari; 2) Dalam pengambilan keputusan, kepentingan rakyat (demokrasi) yang

<sup>31</sup> R. Hardawiryana (Penerj.).1993. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Dokpen KWI. hlm. 346.

<sup>32</sup> R. Hardawiryana (Penerj.).1999. *Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari “Rerum Novarum” sampai “Centesimus annus”*. Edisi kedua April 2002. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Hlm. 871.

<sup>33</sup> Ahmad Yulianto, dkk.2022. *Materi Pokok Sub Bidang Studi Pancasila dalam Bahan Ajar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Hlm. 64.

dipentingkan; 3) Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan; 4) Menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam pencapaian tujuan keadilan; 5) Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan dan kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan yang Maha Esa.

### c. Konsep Politik

Menurut Ramlan Surbakti, ada 5 (lima) pandangan mengenai politik, yaitu<sup>34</sup>:

#### 1) Pandangan Klasik

Aristoteles melihat Politik sebagai perkumpulan warga negara yang berfungsi untuk memperjuangkan kebaikan bersama seluruh masyarakat yang dianggapnya memiliki nilai moral lebih tinggi dari kepentingan individu. Kebaikan bersama atau kepentingan umum biasanya merujuk pada tujuan moral atau nilai ideal yang bersifat abstrak seperti kebenaran, keadilan dan kebahagiaan.

#### 2) Pandangan Kelembagaan

Pandangan ini memaknai politik sebagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber menjelaskan politik sebagai persaingan dalam hal membagi kekuasaan atau mempengaruhi pembagian kekuasaan baik kekuasaan antarnegara maupun kekuasaan antarkelompok dalam suatu negara. Pandangan ini sangat mementingkan struktur atau lembaga, maka seringkali paksaan fisik kepada warga negara disistemisasikan sedemikian rupa sebagai perwujudan kekuasaan demi penyelenggaraan negara.

#### 3) Pandangan Kekuasaan

Menurut Robson, politik merupakan tindakan mencari dan mempertahankan kekuasaan atau menentang pelaksanaan kekuasaan. Sementara kekuasaan itu sendiri merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain, melalui pikiran dan tindakannya, sehingga orang itu berpikir dan bertindak sesuai dengan seseorang yang mempengaruhinya.

<sup>34</sup> Lihat Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 1-8.

#### 4) Pandangan Fungsionalisme

Davis Easton berpendapat bahwa politik merupakan alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan karena itu mengikat masyarakat. Artinya, politik dipandang secara fungsional yaitu kegiatan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan umum. Tujuan perumusan dan implementasi kebijakan umum adalah untuk mencapai keadilan, persamaan, kebebasan, demokrasi, serta nilai-nilai religious dan sosio-kultural.

#### 5) Pandangan Konflik

Perspektif konflik menggambarkan politik sebagai kegiatan mempengaruhi perumusan dan kebijakan publik dengan tujuan mempengaruhi, mencapai, dan melanggengkan nilai-nilai. Akibatnya, sering terjadi perdebatan dan konflik antara pihak yang memperjuangkan dan dan pihak yang mempertahankan nilai.

### 10. Data dan Fakta

Dihadapkan dengan berbagai fenomena yang telah diuraikan bab terdahulu, berikut data dan fakta terkait keterlibatan Gereja Katolik Indonesia dalam politik bangsa dan kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang belum ideal.

#### a. Keterlibatan Gereja Katolik dalam Politik Bangsa

Gereja Katolik pertama kali masuk Indonesia pada abad VII di Barus (Pancur), Sibolga. Di abad XIV-XV terdapat kesaksian mengenai adanya umat Katolik di Sumatera Selatan. Abad XVI, agama Katolik masuk ke Indonesia tepatnya di Maluku seiring dengan kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol yang berdagang rempah-rempah. Salah satu misionaris katoliknya adalah St. Fransiskus Xaverius (1546-1547) yang sempat berkunjung ke Ambon, Saparua dan Ternate. Sementara di Jakarta hadirnya Gereja Katolik pada tahun 1522 yang ditandai dengan batu bertanda salib sebagai peringatan hubungan antara pelayaran Portugis dan Kerajaan Pajajaran. Namun pada abad XVII dan XIX tepatnya saat VOC berkuasa tahun 1619-1792, kegiatan agama Katolik dilarang. Baru pada awal abad XIX, VOC digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, kegiatan agama katolik diperbolehkan dan mulai berkembang. Maka didirikan prefektur Apostolik Hindia Belanda Batavia pada tahun 1807. Misi

Katolik di Yogyakarta baru diperbolehkan dan mulai berkembang kemudian, diawali dengan datangnya Pastor Van Lith di Muntilan<sup>35</sup>. Selanjutnya agama Katolik berkembang hingga kini tersebar di seluruh pelosok Nusantara dengan 37 Keuskupan dan semua Uskupnya berhimpun dalam Konferensi Waligereja Indonesia.

Kehadiran Gereja Katolik di Indonesia ini, telah turut terlibat dalam kegiatan politik bangsa mulai dari masa pergerakan persiapan kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang ini. Ada beberapa hal yang dapat dicatat terkait keterlibatan umat Katolik dalam kehidupan politik bangsa, yaitu antara lain:

#### 1) Masa Pra-Kemerdekaan

Sejak persiapan kemerdekaan Indonesia, Gereja Katolik telah hadir dan terlibat dalam perjuangan bangsa. Ada beberapa bentuk keterlibatan yang patut dicatat antara lain:

Pastor Van Lith Misionaris Katolik asal Belanda mulai berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan sekolah untuk penduduk pribumi dari Jawa dan sekitarnya dan dari agama apapun sejak tahun tahun 1900. Pastor Van Lith memperjuangkan pendidikan bagi penduduk pribumi juga pengembangan budaya bangsa. Beberapa muridnya yang kemudian menjadi kader bangsa yang berkualitas adalah Mgr. Albertus Sugijapranata, I.J. Kasimo dan Frans Seda. Oleh karenanya, pada bulan September 2016, Pemerintah Indonesia menganugerahkan Satya Lencana Kebudayaan kepada Pastor Van Lith atas jasanya merintis pendidikan berasrama untuk membentuk manusia Indonesia yang nasionalis, berkarakter dan berintegritas<sup>36</sup>.

Terkait Kongres Pemuda II tanggal 27 Oktober 1928, salah satu umat katolik dari Jong Ambon yaitu, Johhannes Leimena, mengupayakan

<sup>35</sup> Lihat: Katolisitas, Bagaimana Secara Garis Besar Sejarah Gereja Katolik di Indonesia?, <http://katolisitas.org/unit/bagaimana-secara-garis-besar-sejarah-gereja-katolik-di-indonesia>; Bdk. Keuskupan Agung Jakarta, Sejarah Singkat KAJ, <https://www.kaj.or.id/keuskupan-agung-jakarta/sejarah-singkat-keuskupan-agung-jakarta>, diakses tanggal 05 Agustus 2022, pukul 09.12 WIB.

<sup>36</sup> Samudera Eka Cipta, 2020, Jurnal, 100% Katolik 100% Indonesia: Suatu Tunjauan Historis Perkembangan Nasionalisme Umat Katolik di Indonesia, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, Vol 14, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 117-118; bdk. Mathias Haryadi, 25 September 2016, Satya Lencana Kebudayaan Untuk Romo Van Lith, SJ atas Jasanya Kembangkan Pendidikan Berasrama, <https://www.sesawi.net/satya-lencana-kebudayaan-untuk-romo-van-lith-sj-atas-jasanya-kembangkan-pendidikan-berasrama/>, diakses tanggal 05 Agustus 2022, pukul 10.14 WIB.

kegiatan Kongres tersebut diselenggarakan di gedung Perhimpunan Pemuda Katolik, area Katedral Jakarta sekarang<sup>37</sup>.

Selain itu, satu lagi tokoh awam katolik yang terkenal I.J. Kasimo. Beliau mulai aktif dalam dunia politik sebagai Jong Java dan mendirikan Partai Politik Katolik tahun 1923 dan menjadi anggota Volksraad tahun 1931-1942. Setelah Indonesia merdeka, I.J. Kasimo menjadi menteri, menjadi anggota dewan yang memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara dan anggota Dewan Pertimbangan Agung RI. Tahun 2011, ia dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Negara<sup>38</sup>.

Dari Ende, para Imam Katolik menjadi sahabat bung Karno dalam ziarah batinnya merumuskan Pancasila<sup>39</sup>.

## 2) Masa Perjuangan Kemerdekaan

Salah satu tokoh Katolik yang terkenal dan berperan di masa perjuangan Kemerdekaan Indonesia adalah Mgr. Albertus Soegijapranoto. Beberapa perjuangan Mgr. Soegijapranata yang dapat dicatat adalah antara lain, mendesak Vatikan untuk mengakui Kemerdekaan Indonesia. Mgr. Soegija mengirimkan surat pada tanggal 18 Januari 1947 kepada Paus Pius XII di Vatikan, yang isinya mengenai kejayaan pendudukan tentara Belanda di Indonesia Pasca proklamasi Kemerdekaan RI dan mendesak pengakuan kemerdekaan RI. Diplomasi Mgr. Soegija membuahkan hasil, bahwa Vatikan menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 6 Juli 1947 dan memerintahkan Mgr. George Marie Joseph d'Ardoye menjadi duta Besar Vatikan untuk Indonesia dan menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Pemerintah Indonesia<sup>40</sup>. Mgr. Soegija juga mencetuskan semboyan 100% Patriotik 100% Katolik. Semboyan itu pertama kali dinyatakan Mgr. Soegijapranata pada surat gembalanya,

<sup>37</sup> Wahyu Adityo Prodjo, 31 Oktober 2020, Kongres Sumpah Pemuda Ternyata Pernah Digelar di Area Gereja Katedral, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/31/08080091/kongres-sumpah-pemuda-ternyata-pernah-digelar-di-area-gereja-katedral?page=all>, diakses tanggal 05 Agustus 2022, pukul 10.31 WIB.

<sup>38</sup> Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 10 November 2017, <https://atmajaya.ac.id/web/Konten.aspx?gid=highlight&cid=IJKasimo-Sosok-yang-Tegas-Berprinsip-Teguh-dan-Cinta-Kebenaran>, diakses tanggal 05 Agustus 2022, pukul 16:19 WIB.

<sup>39</sup> Pena Katolik, 1 Juni 2020, Soekarno, Ende dan Gereja Katolik, <https://penakatolik.com/2022/06/01/soekarno-ende-dan-gereja-katolik/>, diakses tanggal 05 Agustus 2022, pukul 10.46 WIB.

<sup>40</sup> Bdk. Anhar Gonggong, 2012, Mgr. Albertus Soegijapranata: Antara Gereja dan Negara; bdk. M.C. Ricklefs, 2005, Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004; dalam Gama Prabowo, 17 Desember 2020, Respons Vatikan Terhadap Kemerdekaan Indonesia, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/113711569/respons-vatikan-terhadap-kemerdekaan-indonesia?page=all>, diakses tanggal 05 Agustus 2022, pukul 11.24 WIB.

dalam rangka 12,5 tahun Tahbisannya sebagai Uskup untuk Vikariat Apostolik Semarang, pada tanggal 9 Februari 1953, yang menyatakan bahwa, “Jika kita benar-benar Katolik sejati sekaligus juga patriot sejati, karena kita adalah 100% Patriot, karena kita adalah 100% Katolik”<sup>41</sup>. Hal ini juga disampaikannya pada malam pembukaan Kongres Pemuda Katolik seluruh Indonesia di Semarang pada tanggal 27 Desember 1954 dalam sebuah pidato yang kutipannya berbunyi, “Jika kita merasa sebagai orang Kristen yang baik, kita semestinya juga menjadi seorang patriot yang baik. Karenanya, kita merasa bahwa kita 100% patriotik sebab kita juga merasa 100% Katolik. Malahan menurut perintah keempat dari Sepuluh Perintah Allah, sebagaimana tertulis dalam Katekismus, kita harus mengasihi Gereja Katolik, dan dengan demikian juga mengasihi negara, dengan segenap hati” (dikutip dalam Subanar, 2005, hlm. 82)<sup>42</sup>. Semboyan ini disampaikan oleh Mgr. Soegijapranata untuk membakar semangat patriotik umat Katolik terhadap NKRI. Dengan demikian, semboyan 100% Patriotik 100% Katolik atau 100% Katolik 100% Indonesia hendak menjelaskan bahwa umat Katolik memiliki “dua kewarganegaraan”, yaitu menjadi warga NKRI secara penuh sekaligus menjadi warga negara Kerajaan Allah secara penuh. Oleh Presiden Soekarno, Mgr. Soegija ditetapkan sebagai pahlawan Nasional. Selain Mgr. Soegija, terdapat beberapa putera terbaik yang gugur di medan pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Brigjen TNI (Anumerta) Ignasius Slamet Riyadi, Marsma (Anumerta) Agustinus Adisoecipto, Laksdya TNI (Anumerta) Yosaphat Sudarso dan yang lainnya.

### 3) Masa Kemerdekaan

Adapun tokoh Katolik lainnya yang terlibat dalam pemerintahan dan partai politik seperti, pada zaman orde Lama dan Orde Baru: Frans Seda, Cosmas Batubara, J.B. Sumarlin, L.B. Moerdani, dll. Selanjutnya di masa Reformasi: Ignasius Jonan, Mary E. Pangestu, Hasto Kristiyanto, Johnny G. Plate, dll.

<sup>41</sup> Y. Gunawan. 2014. *Soegija dan Keluarga*. <https://news.unika.ac.id/2014/05/soegija-dan-keluarga/>. 24. Mei. diakses tanggal 28 Mei 2022, pukul 22.45 WIB.

<sup>42</sup> Petrus Danan Widharsana. 2018. *Mengamalkan Pancasila dalam terang Iman Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hlm. 133; Bdk. Arsen Budu. 2017. 100% Katolik 100% Patriot. <https://www.kompasiana.com/krisibu/59f0cbadb3f5ca64a828dc64/100-katolik-100-patriot>. 26 Oktober. diakses tanggal 28 Mei 2022, pukul 10.52 WIB.

Mereka terlibat membangun bangsa sebagai bentuk perwujudan iman katoliknyanya sekaligus dengan rasa cinta tanah airnya.

Selain itu, Konferensi Waligereja Indonesia atas nama Gereja Katolik Indonesia mencatat sejarah penting pada bulan November tahun 1987. Gereja Katolik Indonesia secara terbuka menegaskan kembali kesatuannya dengan NKRI melalui pernyataannya menerima Pancasila dengan sepenuh hati yang tertuang dalam Statuta Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), bahwa dalam terang iman Katolik Konferensi Waligereja Indonesia berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 3)<sup>43</sup>. Gereja Katolik pun merumuskan bentuk kerja sama dengan Negara dengan tidak mengidentikan dirinya dengan sistem pemerintahan tetapi menerima dan mengamalkan Pancasila karena mengandung nilai-nilai dasar hidup manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran dan pandangan Gereja Katolik<sup>44</sup>. Keputusan pernyataan Gereja Katolik ini kembali menegaskan kecintaan dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan senantiasa terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.

b. Kondisi Kehidupan Politik Bangsa yang belum Ideal

1) Adanya Praktek Politik Identitas

Pada dasarnya politik identitas dapat dipahami sebagai tindakan dari individu atau kelompok dalam politik yang berfokus pada upaya perebutan kekuasaan atas dasar kesamaan identitas. Kesamaan yang dimaksud

<sup>43</sup> Ignasius Suharyo, *Hidup Sebagai Warga Negara yang 100% Katolik, 100% Indonesia*, disampaikan dalam Sambutan buku Petrus Danan Widharsana, *Ibid.*, hlm 15.

<sup>44</sup> Rumusan pernyataan Gereja Katolik menerima Pancasila sekaligus menjadi landasan hubungan kerja sama dengan Negara: "Agama Katolik tidak dapat mengidentifikasi diri dengan salah satu ideologi atau pola pemerintahan tertentu. Namun demikian, umat katolik indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa negara kita memilih Pancasila sebagai filsafat dan dasarnya. Pancasila mengandung nilai-nilai manusiawi yang terungkap dalam kehidupan dan sejarah bangsa, dan dapat diterima serta didukung semua golongan dan semua pihak di dalam masyarakat kita yang majemuk ini. Gereja yakin bahwa Pancasila, yang telah teruji dan terbukti keampuhannya dalam sejarah Republik kita ini, merupakan wadah kesatuan dan persatuan nasional, asalkan tidak digunakan sebagai topeng untuk melindungi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu... . Umat katolik menerima landasan yang sungguh-sungguh dapat menjadi wadah pemersatu pelbagai golongan di dalam masyarakat, yakni Pancasila. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat katolik menerima Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Umat Katolik mendukung Pancasila bukan hanya sebagai sarana pemersatu, melainkan juga sebagai ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara, yang berakar di dalam budaya dan sejarah suku-suku bangsa kita. Pancasila, baik sebagai keseluruhan maupun ditinjau sila demi sila, mencanangkan nilai – nilai dasar hidup manusiawi, sejalan dengan nilai yang dikemukakan oleh ajaran dan pandangan Gereja katolik." (Dokumen KWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila", 7 Maret 1985 dikutip dalam Ignasius Suharyo, *Ibid.*).

adalah ras, etnis, jenis kelamin atau agama<sup>45</sup>. Artinya, dalam demokrasi, politik identitas adalah tindakan pengorganisasian identitas tertentu secara politis yang sering kali digunakan dalam rangka penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi baik kebijakan maupun tujuan kekuasaan<sup>46</sup>.

Munculnya politik identitas agama dan etnis di Indonesia dapat dilihat pada pemilihan kepala daerah, terutama untuk daerah yang masyarakatnya majemuk. Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu contoh praktik politik identitas. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pada Pilkada DKI Jakarta 2017, terdapat praktik politik identitas yang kental, kuat, mendasar yang berdampak pada kehidupan sosial politik agama. Di sisi lain, Direktur Lingkar Madani Indonesia Raya Rangkuti menilai politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 berdampak luas dan sangat berbahaya, karena konsekuensinya masih terasa hingga saat ini. Perpecahan masyarakat pun tak bisa disembuhkan, luka akibat politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta hampir tak mungkin bisa disembuhkan<sup>47</sup>.

Hasil temuan riset yang dilakukan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menyatakan bahwa<sup>48</sup>, pertama: konteks kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah keberlanjutan dari polarisasi politik dan politik identitas yang tajam selama Pilpres 2014 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Artinya, ada semacam dinamika kontestasi dan polarisasi yang terus dirawat; kedua: rancangan elektoral pemilu, yang menentukan *presidential threshold*, juga meningkatkan penguatan polarisasi politik karena hanya membuka peluang bagi dua kandidat untuk muncul dalam kontestasi politik; ketiga: fenomena industri konsultan politik, influencer, dan buzzer dalam kampanye digital Pasangan Calon (Paslon). Mereka tidak hanya memainkan peran penting dalam menentukan munculnya isu dan memperluas konten kampanye di platform

---

<sup>45</sup> Sri Astuti Buchari. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 30

<sup>46</sup> Noviardi Ferzi.2022. Politik Identitas Etnis dalam Demokrasi, <https://jamberita.com/read/2022/02/08/5972089/politik-identitas-etnis-dalam-demokrasi/>, 8 Februari. diakses tanggal 25 April 2022, pukul 22.51 WIB.

<sup>47</sup> Fitria Chusna Farisa.2020. Ray Rangkuti: Luka Akibat Politik Identitas Pilkada DKI 2017 Belum Sembuh, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/14/08475971/ray-rangkuti-luka-akibat-politik-identitas-pilkada-dki-2017-belum-semboh?page=all>. 14 Agustus. diakses tanggal 25 April 2022, pukul 22.20 WIT.

<sup>48</sup> Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. 2019. Politik Identitas Dalam Kampanye Pemilu 2019, [https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi\\_puskapol/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019-2.html](https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019-2.html). 15 Juli. diakses tanggal 25 April 2022, pukul 23.46 WIT.

digital, tetapi peran itu juga berkontribusi pada memperburuk polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas. Jelas bahwa isu-isu non-programatik terus diciptakan dan diagungkan oleh kekuatan *cyber army* di masing-masing kubu; keempat: keserantakan Pemilu 2019 menyebabkan lebih dominannya isu Pilpres dan meminggirkan perhatian terhadap Pemilihan Legislatif (Pileg), baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; kelima: media sebagai sumber informasi publik justru cenderung memiliki preferensi terhadap isu-isu non programatik dalam pemberitaannya.

Hasil temuan riset ini menunjukkan adanya indikasi menguatnya politik identitas dalam praktek demokrasi di Indonesia.

## 2) Adanya Praktek Intoleran

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan sebuah studi tentang intoleran yang dirumuskan berupa pertanyaan apakah seorang Muslim (atau non-Muslim) keberatan ketika non-Muslim (atau Muslim) melaksanakan kegiatan peribadatan atau menjadi pemimpin pemerintahan di berbagai tingkatan. Survei LSI dengan menggunakan skema tertentu itu menunjukkan adanya peningkatan warga muslim yang rata-rata intoleran. Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa skor rata-rata muslim intoleransi: tahun 2016 sebesar 46,6 %, tahun 2017 sebesar 50,4% dan tahun 2018 sebesar 54,2%<sup>49</sup>.

## 3) Adanya Golput dalam Pemilu

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa adanya tren peningkatan golput dalam Pemilu, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada.

### Pemilu Legislatif (Pileg)

Data Pemilu Legislatif setelah reformasi, yakni tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014<sup>50</sup>, menunjukkan adanya penurunan tingkat partisipasi politik dalam pemilu sedangkan angka golput meningkat. Angka penurunan tingkat partisipasi politik berkisar dari 92,6% hingga 75,2% dan jumlah golput

<sup>49</sup> Burhanuddin Muhtadi. 2018. Menguatnya Intoleransi dan Politik Identitas, <https://mediaindonesia.com/opini/205379/menguatnya-intoleransi-dan-politik-identitas>. 28 Juni 2022. diakses tanggal 26 April 2022, pukul 22.41 WIB.

<sup>50</sup> Ditpolkom Bappenas. 2018. [http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/6\\_Data-Partisipasi-Pemilu-dan-Pilkada.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/6_Data-Partisipasi-Pemilu-dan-Pilkada.pdf). 12 Juni. Diakses tanggal 26 April 2022, pukul 23.05 WIB.

meningkat tajam yang berkisar antara 7,3% hingga 29,1%. Namun pada 2019<sup>51</sup> partisipasi pemilu semakin mengalami penurunan hingga 70,4% dan angka golput pun meningkat menjadi 29,6%.

#### Pemilu Presiden (Pilpres)

Indonesia terhitung telah menjalani Pilpres selama empat kali di masa pasca-reformasi. Pada tiga kali pilpres yaitu tahun 2004, 2009 dan 2014 tercatat ada peningkatan jumlah golput dan penurunan partisipasi pilpres dari tahun ke tahunnya. Peningkatan jumlah golput tersebut berkisar dari 21,8% hingga 29,1%.<sup>52</sup> Hanya pada tahun 2019, prosentase golput menurun secara signifikan menjadi 18,1%<sup>53</sup>.

#### Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)

Sejak diadakannya Pilkada serentak tahun 2015, angka golput mengalami fluktuasi. Pilkada serentak tahun 2015 dan 2020 angka golput berada pada 30,0% dan 30,1%. Sedangkan Pilkada serentak tahun 2017 dan 2018, angka golput berkisar pada angka 26, yaitu tahun 2017 sebesar 26,0% dan tahun 2018 bertambah 0,8% sehingga menjadi 26,8 %<sup>54</sup>.

#### 4) Adanya Praktek Korupsi

Kondisi korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan. Secara umum, kondisi penindakan korupsi di Indonesia dalam lima tahun terakhir yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yakni: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian, dapat disimpulkan bahwa<sup>55</sup>: sejak semester I tahun 2017 sampai semester I tahun 2021, penindakan kasus korupsi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum cenderung fluktuatif, baik dari jumlah tersangka yang ditetapkan maupun jumlah kasus yang ditangani. Sementara nilai kerugian negara yang

<sup>51</sup> Lokadata.beritagar.id.Lingkaran Survey Indonesia (LSI). <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persentase-golput-pemilu-legislatif-dan-pemilu-presiden-1971-2019-1601357218>. diakses tanggal 2 Mei 2022, pukul 23.21 WIB.

<sup>52</sup> Andrea Lidwina.2020. *Bagaimana Partisipasi Pemilih Pilpres dan Pilkada dalam Lima Tahun Terakhir*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir>. 7 Juli. diakses tanggal 2 Mei 2022, pukul 11:21 WIB.

<sup>53</sup> Alwin J. Hamonangan, dkk. 2022. *Tingkat Partisipasi Pemilih dan Pengambilan Kebijakan di Indonesia*. <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>. 26 Februari. diakses tanggal 2 Mei 2022 pukul 10.56 WIB.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Diky Anandya, dkk.2021. Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021, Jakarta: Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202021.pdf>. hlm. 7., diakses tanggal 2 Mei 2022, pukul 17.37 WIB.

diakibat oleh korupsi trennya semakin meningkat. Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa masih perlu ditingkatkan sistem pengawasan terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun untuk mencegah korupsi.

## 11. Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional akan memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, perkembangan lingkungan strategis di segala lingkup harus ditelaah dan dikaji agar negara Indonesia dapat menyusun strategi dan kebijakan yang tepat di bidang politik untuk kepentingan nasionalnya. Untuk menyikapi perkembangan dan dinamika lingkungan strategis, perlu dilakukan indentifikasi terhadap perkembangan global, regional dan nasional yang mempengaruhi kehidupan dan kebijakan serta ketahanan politik nasional.

### a. Pengaruh Lingkungan Global

Secara global, untuk menentukan tingkat demokrasi suatu negara ditentukan melalui indeks demokrasi yang dikategorikan menjadi empat rezim, yaitu: demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida dan rezim ototriner. Menurut laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat 52 dunia dengan skor 6,71. Menyandang peringkat ini berarti Indonesia tergolong negara dengan demokrasi cacat<sup>56</sup>. Sebagai negara demokrasi cacat menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun, Indonesia dinilai masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya olitik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, dan kinerja pemerintah yang belum optimal.

Kondisi Indonesia seperti ini dapat merusak citra positif Indonesia di mata dunia. Hal ini dapat menimbulkan dampak negative yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.

<sup>56</sup> Monavia Ayu Risaty. 14 Februari 2022. Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, pukul 9:26 WIB.

Oleh karenanya, diperlukan pendidikan politik bagi warga negara, agar meningkatkan indeks demokrasi Indonesia di mata dunia.

b. Pengaruh Lingkungan Regional

Kehidupan politik bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik Regional. Kepentingan nasional dipertaruhkan dalam setiap kerjasama pada tataran regional. Indonesia akan berperan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Sebagai Ketua ASEAN maka Indonesia diharapkan dapat semakin memantapkan Kepemimpinannya di ASEAN melalui inisiatif kerjasama yang dapat mendukung kepentingan nasional Indonesia di tingkat regional ASEAN dan global. Untuk itu penting bagi Indonesia untuk memulai proses diskusi di tingkat nasional dan upaya pendekatan di tingkat global guna membahas batas Negara-negara ASEAN yang diklaim Cina serta isu persaingan antara AS dan Cina di kawasan ASEAN. Persoalan-persoalan ini merupakan tantangan bagi ASEAN untuk mempertahankan sentralitas dan kesatuan ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Dalam hal ini dipandang penting peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa menahan diri dan mengutamakan dialog dalam penyelesaian masalah serta memperkuat persatuan dan kekompakan ASEAN agar tetap netral dalam menghadapi pengaruh AS dan Cina.

Untuk itu, Indonesia terlebih dahulu menjaga stabilitas politik nasional agar tidak menjadi hambatan untuk mengupayakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan ASEAN. Apalagi menjelang Pemilu serentak tahun 2024, pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat diperlukan agar meredusi atau mencegah terjadinya ketidakstabilan politik bangsa Indonesia.

c. Pengaruh Lingkungan Nasional

1) Gatra Demografi

Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) kementerian Dalam Negeri Indonesia, menyebutkan bahwa penduduk Indonesia per 30 Desember 2021 berjumlah 273.879.750 jiwa<sup>57</sup>. Jumlah penduduk ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat

<sup>57</sup> Sekretariat Dukcapil. 2022. 273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>. 24 Februari. diakses tanggal 16 Mei 2022, pukul 10:29 WIB.

negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi modal dalam pembangunan nasional pada umumnya dan di bidang politik pada khususnya. Namun, jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan bagi pembangunan nasional apabila mutunya rendah. Salah satu alat ukur kualitas atau sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Berdasarkan data komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan per Juni 2021 yang dikeluarkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri<sup>58</sup>, dapat disimpulkan bahwa, penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga Perguruan tinggi (D1-S3) berjumlah 5,99%, penduduk yang berpendidikan SLTP dan SLTA berjumlah 35,2%, sedangkan 58,53% penduduk Indonesia adalah tamat SD, belum tamat SD dan yang tidak/belum sekolah.

Sedangkan angka buta huruf menurut data BPS menunjukkan penurunan tetapi tidak signifikan<sup>59</sup>. Pada Tahun 2021, angka buta huruf usia 15+ berjumlah 3,96%, usia 15-44 sebanyak 0,73% dan usia 45+ berjumlah 9,24%. Apabila dijumlahkan maka, angka buta huruf tahun 2021 sebanyak 13,93%.

Berdasarkan data BPS ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia separuh lebihnya yakni 58,53% adalah tamatan SD atau tidak bersekolah sampai tamat SD. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman sebagian penduduk Indonesia cukup terbatas. Hal ini dipertegas lagi dengan data penduduk buta huruf berjumlah 9,24% yang berarti tingkat pemahaman dan partisipasi penduduk dalam kehidupan politik bangsa agak minim. Kondisi tingkat pendidikan seperti ini menjadi sangat mudah untuk dimanfaatkan dalam kesempatan-kesempatan pesta demokrasi seperti Pileg, Pilpres dan Pemilukada.

## 2) Gatra Ideologi

Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari berbagai latar belakang kesukuan, etnis, agama, ras dan golongan yang berbeda-beda. Fenomena kemajemukan bangsa dapat dilihat dari jumlah, komposisi dan

<sup>58</sup> Viva Budi Kusnandar. 2021. Hanya 0,02% Penduduk Indonesia Berpendidikan Hingga S3 Pada Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/20/hanya-002-penduduk-indonesia-berpendidikan-hingga-s3-pada-juni-2021>. 20 November. diakses pada tanggal 16 Mei 2022, pukul 22:31 WIB.

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik. Prosentase Penduduk Buta Huruf (Persen), 2019-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/28/102/1/persentase-penduduk-buta-huruf.html>, diakses tanggal 19 Mei 2022, pukul 23.42 WIB.

sebaran penduduk berdasarkan aspek-aspek sosial budaya. Dilihat dari aspek suku bangsa, Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa yang bermukim di ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Data BPS 2011<sup>60</sup>, menunjukkan bahwa, dilihat dari komposisi penduduk Indonesia, suku Jawa terbesar mencapai 40,22% dari penduduk Indonesia, disusul suku Sunda sebanyak 15,5%, Suku Batak 3,58%, suku asal Sulawesi selain Makasar, Bugis, Minahasa dan Gorontalo sebanyak 3,22% dan Suku Madura sejumlah 3,03% serta suku-suku lainnya yang banyaknya sekitar 2% ke bawah.

Apa bila dilihat dari segi pemeluk agamanya, data BPS menunjukkan bahwa<sup>61</sup>, pemeluk agama Islam yang terbesar dengan komposisi 87,18%, lalu menyusul Kristen 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Budha 0,72% dan Khong Hu Cu 0,05% serta agama lainnya.

Keanekaragaman bangsa menurut suku dan agama ini jika dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan yang membawa Indonesia pada kemajuan dan ketahanan Nasional yang tangguh. Sikap toleransi merupakan nilai luhur bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia agar keberagaman tetap terjaga dalam kesatuan sebagai bangsa dan Negara Indonesia.

Namun apabila keberagaman ini dimanfaatkan oleh aktor politik yang memainkan politik identitas, maka perbedaan ini akan ditonjolkan dan terpolarisasi yang rawan

terjadi konflik, pertikaian dan permusuhan yang berkepanjangan. Apabila tidak ditangani dengan serius maka membahayakan integrasi bangsa.

### 3) Gatra Politik

Parpol mempunyai posisi penting pada proses negara demokrasi. Tidak dapat dibayangkan bila negara demokrasi tanpa adanya partai politik yang masih sebagai saluran utama kepentingan dan rekrutmen pengisian jabatan publik. Parpol dapat dilihat sebagai pelaku sekaligus medium politik bernegara. Parpol mempunyai kedudukan yang begitu penting lantaran

<sup>60</sup> Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra. 2011. Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik. hlm. 9, <https://media.neliti.com/media/publications/49956-ID-kewarganegaraan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk-indonesia.pdf>, diakses tanggal 19 Mei 2022, pukul 16:52.

<sup>61</sup> Ibid., hlm. 10.

diatur pada konstitusi. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6A UUD NRI bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusung Parpol dan Gabungan Parpol. Selanjutnya diatur dalam Pasal 22E, bahwa peserta Pemilu Legislatif adalah Parpol.

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Martin Hutabarat menyebutkan bahwa kedudukan parpol penting juga lantaran mempunyai 3 fungsi, yaitu<sup>62</sup>: 1) menyiapkan kader buat kepemimpinan nasional baik pada legislatif juga eksekutif; 2) menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 3) melakukan pendidikan politik. Namun, saat ini, parpol dinilainya belum melaksanakan pendidikan politik secara maksimal baik pada internal partai maupun pada masyarakat. Pendidikan politik pada internal parpol, tampak pada kaderisasi, tetapi kaderisasi ini tidak berjalan maksimal. Hal ini terlihat berdasarkan pencalonan kepala daerah bukan kader terbaik parpol, bahkan mengambil kader dari parpol lain. Maksud pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat adalah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi pada politik atau mengikuti pemilu. Namun, apabila pemilih menentukan pilihannya masih berdasarkan faktor identitas tertentu yaitu etnis atau agama ketimbang faktor kualitas calon dan program kerjanya, mengindikasikan bahwa parpol dan negara belum melakukan pendidikan politik secara maksimal dan berkesinambungan.

Dalam nada yang sama, Rambe Kamarul Zaman menambahkan bahwa, gagalnya pendidikan politik kepada masyarakat ditandai dengan adanya masyarakat memilih calon pemimpin bukan berdasarkan latar belakang dan kemampuan calon melainkan karena *money politics*. Selain itu, menurut Indah Febriani, adanya golongan putih (*golput*) bukanya hanya karena elit parpol terlibat kasus korupsi dan parpol menjadi lembaga terkorup melainkan juga karena terkait pendidikan politik yang belum maksimal<sup>63</sup>.

Adapun alasan pendidikan politik belum berjalan maksimal disebabkan beberapa hal, yakni<sup>64</sup>: 1) Parpol hanya sibuk dengan persoalannya sendiri

---

<sup>62</sup> Muhammad Idris. 2019. Parpol Dinilai Belum Maksimal Melaksanakan Pendidikan Politik. <https://news.detik.com/berita/d-4632837/parpol-dinilai-belum-maksimal-melaksanakan-pendidikan-politik>. 20 Juli. diakses tanggal 10 Mei 2022, pukul 17:23 WIB.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Liputan6.Com. 2019. Parpol Belum Maksimal Melaksanakan Pendidikan Politik, Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh kerja sama MPR dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera

(masalah internal); 2) Parpol hanya mengejar kekuasaan; 3) Parpol tidak memiliki format pendidikan politik yang jelas. Pelaksanaan kampanye akbar dalam pemilu adalah pengerahan dan mobilisasi masa bukan terutama merupakan pelaksanaan pendidikan politik; 4) Belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang format pendidikan politik.

Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka kondisi kehidupan politik tetap penuh dengan kecurangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi makin menurun. Akibat lanjutnya, kepercayaan publik kepada pemerintah dan pemimpin yang dipilih makin merosot. Hal ini berkepanjangan akan menyebabkan kekacauan dan kegaduhan.

#### 4) Gatra Sosial Budaya

Jumlah penduduk Indonesia yang besar ini, mencatat jumlah kemiskinan dan angka pengangguran yang cukup banyak. BPS melaporkan bahwa prosentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sebanyak 9,71% atau 26,50 juta orang<sup>65</sup>. Sedangkan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) pada Agustus 2021 adalah 6,49% atau 9,10 juta penduduk<sup>66</sup>.

Kondisi kemiskinan dan pengangguran ini akan menjadi rawan sasaran pelaksanaan politik uang. Dalam keadaan kesulitan ekonomi, seseorang bisa lebih mudah dibeli suaranya dengan uang. Kelompok ini cenderung menjatuhkan pilihannya pada figur tertentu dalam pileg, pilpres maupun pilkada bukan berdasarkan kualitas figur dan programnya tetapi berdasarkan jumlah uang yang diterimanya. Sedangkan pemimpin yang memainkan politik uang tersebut akan sibuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkannya dalam proses pemilihan dengan cara jual beli

Selatan. <https://www.liputan6.com/news/read/4017920/parpol-belum-maksimal-melaksanakan-pendidikan-politik>. 20 Juli. diakses tanggal 10 Mei 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>65</sup> Dany Saputra. 2022. Kemiskinan RI di Akhir 2021 Turun, Begini Komentar Kemenkeu, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220118/9/1490228/kemiskinan-ri-di-akhir-2021-turun-begini-komentar-kemenkeu>. 18 Januari. diakses 21 Mei 2022, pukul 22.31 WIB; Bdk Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>.

<sup>66</sup> Faisal Javier. 2021. BPS: Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Agustus 2021 Turun 0,58 Persen Dibanding Agustus 2020. <https://data.tempo.co/data/1261/bps-tingkat-pengangguran-terbuka-pada-agustus-2021-turun-058-persen-dibanding-agustus-2020>. 15 November. diakses Tanggal 21 Mei 2022, pukul 22.51 WIB; Bdk. Badan Pusat Statistik, REVISI per 09/11/2021. Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>

jabatan ataupun jenis korupsi lainnya. Perhatiannya terhadap kaum miskin dan pengangguran dianggap sudah dibayar saat pemilihan. Atau pun kelompok ini tetap dipelihara oleh pemimpin yang mempraktekkan politik uang agar menjadi basis masanya untuk pemilu berikutnya. Dengan demikian, kecurangan dalam pemilu dan korupsi tetap dipraktekan dalam kehidupan politik.



### **BAB III**

## **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum**

Pelaksanaan Pendidikan politik merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka menata kehidupan politik bangsa dan negara untuk menjadi semakin lebih baik. Melalui pendidikan politik, masyarakat sekaligus warga Gereja Katolik dapat memiliki pengetahuan politik yang memadai dan semakin berpartisipasi secara maksimal dalam berpolitik. Dengan pendidikan politik, tata nilai demokrasi Pancasila dapat dilestarikan dan warga negara semakin cerdas dalam berperilaku, baik sebagai politikus maupun pejabat pemerintah. Dalam rangka mendukung terciptanya kehidupan politik bangsa dan negara yang semakin lebih baik, Gereja Katolik berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi umatnya. Maka dalam bab III ini akan dianalisis pelaksanaan pendidikan politik pada Gereja Katolik dan kaitannya dengan pendidikan politik oleh negara. Pembahasan ini terdiri dari tiga bagian pokok yaitu analisis Pelaksanaan Pendidikan Politik Pada Gereja Katolik, analisis Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik dan analisis Upaya Peningkatan Pendidikan POlitik Pada Gereja Katolik. Pembahasan ini akan menunjukkan betapa penting dan mendesaknya pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia dan umat Katolik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, Gereja Katolik dan Negara berupaya mengoptimalkan Pendidikan Politik demi kehidupan politik berbangsa dan bernegara yang semakin lebih baik.

#### **13. Analisis Pelaksanaan Pendidikan Politik Pada Gereja Katolik**

##### **a. Berpolitik Sebagai Panggilan Umat Katolik**

Keterlibatan Gereja Katolik dalam kehidupan politik merupakan suatu panggilan. Dikatakan “panggilan” berarti mempunyai makna yang dalam. Kata Panggilan dalam Gereja Katolik selalu dikaitkan dengan Tuhan. Artinya, Tuhanlah yang memanggil umatNya untuk mengikuti kehendakNya. Semenjak seseorang menerima sakramen pembaptisan, dia resmi menjadi anggota Gereja Katolik serentak sebagai murid Kristus. Berdasarkan penerimaan sakramen pembaptisan atau sejak dibaptis, ia mulai dipanggil untuk mengambil

bagian dalam tri-tugas Kristus sebagai Nabi, Imam dan Raja. Hal ini ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) 783, bahwa Yesus Kristus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dijadikan “Imam, Nabi dan Raja”. Seluruh Umat Allah (anggota Gereja Katolik) mengambil bagian dalam ketiga jabatan Kristus ini, dan bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan yang keluar darinya<sup>67</sup>.

Mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam berarti anggota Gereja Katolik melaksanakan tugas Menguduskan. Artinya umat Gereja Katolik berupaya menguduskan dirinya melalui doa, penerimaan sakramen-sakramen dalam ibadat maupun Ekaristi sekaligus menguduskan dunia. Tugas menguduskan ini bukan hanya dalam diri anggota Gereja Katolik tersebut, tetapi juga menguduskan dunia. Dalam tugas menguduskan dunia, anggota Gereja Katolik dipanggil untuk menghadirkan dunia politik yang bebas dari kecurangan, manipulasi, korupsi dan politik identitas.

Mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai nabi berarti anggota Gereja katolik melaksanakan tugas Mewartakan. Artinya anggota Gereja dipanggil untuk mewartakan tentang kebenaran sebagaimana yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mewartakan kebenaran itu tidak hanya dengan kata-kata tetapi harus dinyatakan dengan perbuatan atau kesaksian hidup. Akibatnya seorang anggota Gereja Katolik tidaklah merasa tenang jika masih ada ketidakbenaran dan ketidakadilan yang terjadi di dunia pada umumnya maupun dalam bidang politik pada khususnya.

Sedangkan mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai Raja berarti umat Katolik melaksanakan tugas Menggembalakan. Tugas menggembalakan ini dapat dilihat juga sebagai tugas memimpin. Menjadi pemimpin seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yaitu sebagai pelayan bagi sesama. Oleh karenanya, orang katolik yang menjadi pemimpin dalam tingkatan apapun harus menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Menjadi pelayan berarti bukan diktator, tidak bertindak sewenang-wenang, tidak salah menggunakan wewenang, tidak jual beli jabatan dan sebagainya<sup>68</sup>. Dalam artian tertentu mengambil bagian dalam tugas sebagai raja, umat katolik

<sup>67</sup> Konferensi Waligereja Indonesia. 2007. *Katekismus Gereja Katolik Indonesia*. Op. Cit., hlm. 129.

<sup>68</sup> Lihat Petrus Danan Widharsana dan Victorius Rudy Hartono. 2017. *Pengajaran Iman Katolik*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius. hlm. 154-157; Bdk. KGK 784-786, Ibid. hlm. 129-130.

berusaha menaklukan dosa yang ada di dunia, termasuk dosa dalam dunia politik seperti korupsi, kecurangan-kecurangan dan kebohongan-kebohongan dalam pemilu.

Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa berpolitik sebagai panggilan Gereja Katolik, berarti Allah yang memanggil umat Katolik untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik. Artinya, dalam kehidupan politik itulah, umat Katolik dapat mewujudkan panggilannya sebagai imam, nabi dan raja. Dengan kata lain, terlibat dalam kehidupan politik merupakan kesempatan perwujudan iman umat Katolik. Maka, dibutuhkan tanggung jawab setiap orang beriman Katolik untuk menjadikan atau menciptakan kehidupan politik yang benar, melayani dan suci.

Oleh karena itu, bapak-napak Konsili Vatikan II menekankan bahwa hidup umat Katolik tidak bisa terlepas dari kehidupan dunia ini, karena dunia adalah tempat untuk perwujudan imannya. Bahkan umat Katolik hendaknya turut merasakan suka dan duka hidup dunia ini sebagai bagian dari suka dan dukanya, sebagaimana dikatakan dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* tentang Gereja dalam Dunia Modern, bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga<sup>69</sup>. Ketentuan ini semakin menegaskan bahwa umat Katolik terikat erat dengan kehidupan masyarakat dunia dan terpancang untuk menata dunia ini menjadi lebih baik.

b. Pelaksanaan Pendidikan Politik pada Gereja Katolik

Gereja Katolik menghendaki dan mendorong umatnya untuk berbakti kepada bangsanya sebagai tugas kewarganegaraan termasuk di bidang politik. Namun dalam keterlibatannya bidang politik yang disadarinya sebagai suatu panggilan, umat Katolik diberikan beberapa catatan dari Konsili Vatikan II untuk menjadi panduan yang patut diperhatikannya. Catatan itu ditemukan dalam Dekrit *Apostolicam Actuositatem* artikel 14<sup>70</sup>, yang menghendaki umat Katolik untuk: berbakti kepada bangsa; setia menunaikan tugas-tugas kewarganegaraan; memajukan kesejahteraan umum yang sejati; berbobot dan berpengaruh; menjalankan pemerintahan dengan adil; menjalankan hukum

<sup>69</sup> R. Hardawiryana (Penerj.), Op. Cit., hlm. 292.

<sup>70</sup> Ibid., hlm. 216.

selaras dengan tuntutan moral; teguh dalam iman dan ajaran Kristiani; mahir dalam politik; bekerja sama dengan semua orang yang beritikad baik demi kebenaran, keadilan dan kesucian; jangan menolak menjalankan urusan-urusan umum; dalam kebijaksanaan dan penuh pengertian berdialog dengan semua orang yang beritikad baik untuk menyempurnakan lembaga-lembaga sosial dan umum dalam terang Injil.

Dalam Gereja Katolik, tugas dan panggilan untuk terlibat dan menjalankan politik praktis ini menjadi tanggung jawab kaum awam. Namun keterlibatan kaum awam dalam berpolitik atau sebagai seorang politisi Katolik, mereka tidak berbicara dan bertindak atas nama Gereja Katolik dan mewakili umat Katolik. Dalam berpolitik, kaum awam tidak berada di bawah wewenang pimpinan Gereja Katolik. Seorang politisi Katolik otonom, ia bertanggung jawab terhadap kesadaran dan suara hatinya yang terpancung untuk berpolitik. Dengan demikian, seorang politisi katolik bertindak atas namanya sendiri dan tanggung jawabnya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bonum commune*) bagi masyarakat. Sementara Hierarki Gereja Katolik dilarang berpolitik praktis sesuai ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) artikel 287 § 2<sup>71</sup>. Mereka tidak boleh menjadi pengurus partai politik, pemimpin di bidang politik, dicalonkan menjadi kepala daerah, ataupun kepala negara, pemimpin serikat buruh. Namun demikian, mereka diharapkan memberikan perhatian, bimbingan serta dukungan moral dan spiritual kepada kaum awam yang terjun dalam dunia politik. Kaum Hierarki bertugas mendorong kaum awam untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam berpolitik praktis.

Para pemimpin Gereja Katolik menyadari, bahwa keterlibatan umat Katolik dalam dunia politik bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, konsili menghendaki diadakan pembinaan bagi kaum awam agar sungguh-sungguh dipersiapkan terjun dalam dunia politik, sebagaimana diamanatkan konsili vatican II dalam *Gaudium et Spes* art. 75 yang mengatakan bahwa hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik, yang

<sup>71</sup> Konferensi Waligereja Indonesia. 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Jakarta: DokPen KWI. hlm. 87. Ketentuan Kanon 287 berbunyi: § 1. Para klerikus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia. § 2. Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum.

sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda, supaya semua warga negara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara. Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik, yang sukar dan sekaligus amat luhur, dan berusaha mengamalkannya, tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil.

Dalam Gereja Katolik, tanggung jawab pembinaan atau pendidikan politik bagi umatnya menjadi tugas dan tanggung jawab Uskup atau para Uskup. Di Indonesia tanggung jawab pembinaan dan pendidikan Politik dijalankan oleh para Uskup dalam kolegialitasnya yang terhimpun sebagai Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) maupun setiap Uskup secara otonom di Keuskupannya masing-masing. Dalam membantu karya Uskup dan para Uskup di bidang pendidikan Politik, secara institusional telah dibentuk Komisi Kerasulan awam yang membidangi pendampingan bagi kaum awam untuk terlibat dalam kehidupan politik bangsa dan negara. Komisi ini berada di tingkat KWI, di tingkat Keuskupan bahkan di paroki-paroki dalam sebuah Keuskupan. Adapun beberapa upaya pendidikan politik yang telah dilakukan oleh Gereja Katolik adalah, antara lain:

1) Konferensi Waligereja Indonesia

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya di bidang politik, upaya yang telah dilakukan para Uskup se-Indonesia yang terhimpun sebagai KWI tersebut adalah melalui seruan-seruan, pernyataan-pernyataan dan pandangan-pandangan yang dirumuskan dalam Nota Pastoral dan Surat Gembala. Ada beberapa Nota Pastoral dan Surat Gembala yang telah dikeluarkan KWI terkait bidang politik, yang dapat dijadikan pedoman dan penuntun umat Katolik di Indonesia dalam kehidupan bangsa dan Negara.

Nota Pastoral dan Surat Gembala tersebut adalah, antara lain:

a) Nota Pastoral

Nota Pastoral merupakan hasil studi para Uskup Se-Indonesia dalam mencermati kehidupan bangsa dan Gereja masa kini. Hasil studi itu dirumuskan menjadi ajaran dan anjuran Pastoral yang dapat menjadi panduan umat Katolik Indonesia dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Terdapat beberapa Nota Pastoral yang diterbitkan KWI terkait kehidupan sosial politik, yaitu:

Nota Pastoral Tahun 2003 Tentang Keadilan Sosial Bagi Semua. Nota Pastoral ini diterbitkan berdasarkan keprihatinan para Uskup terhadap hancurnya keadaban politik. Keadaan itu ditandai dengan kenyataan politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dan hanya merupakan ajang pertarungan kekuatan memenangkan kepentingan kelompok. Di sana kepentingan finansial pribadi dan kelompok yang diutamakan akibatnya kesejahteraan umum diabaikan. Dan untuk memenangkan hal tersebut simbol-simbol agama dimanfaatkan. Ada pula keprihatinan lainnya adalah terabaikannya penegakan hukum, sehingga marak terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Para Uskup juga prihatin terhadap pelaksanaan otonomi daerah sebagai desentralisasi kekuasaan serentak menjadi desentralisasi KKN, di mana politik kekuasaan menyuburkan politik uang. Para Uskup melihat akar masalahnya adalah iman tidak lagi menjadi sumber inspirasi kehidupan nyata; kerakusan akan kekuasaan dan kekayaan yang menjadi daya pendorong politik kepentingan; dan cara bertindak berdasarkan dalil tujuan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, para Uskup mendesak agar dalam berpolitik harus memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip politik ini: hormat terhadap martabat manusia; kebebasan; keadilan; solidaritas; subsidiaritas; *fairness*; demokrasi; dan tanggung jawab.

Nota Pastoral Tahun 2004 Tentang Menuju Habitus Baru Bangsa. Nota Pastoral ini berangkat dari keprihatinan para Uskup terhadap hancurnya keadaban publik karena korupsi, kekerasan dan kerusakan lingkungan. Maka, para Uskup menyerukan dan mengajak Gereja Katolik untuk terlibat dalam kehidupan sosial politik dengan membangun habitus baru yakni: Gereja menjadi sahabat bagi bagi semua kalangan; Gereja mengembangkan modal-modal sosial seperti terdapat dalam pembukaan UUD NRI yakni keadilan sosial bagi seluruh bangsa, cinta damai, kesejahteraan umum, solidaritas; Gereja mendorong umat yang mampu dalam bidangnya untuk masuk dalam sistem kerja jejaring; Gereja merasa wajib memberi perhatian khusus pada pelayanan

pendidikan, dan: Gereja menyadari bahwa upaya pembaharuan harus mulai dari diri sendiri.

Nota Pastoral Tahun 2017 Tentang Mencegah dan Memberantas Korupsi. Kali ini para Uskup fokus menyoroti Korupsi sebagai kejahatan sosial. Maka para Uskup mengajak umat Gereja Katolik untuk melaksanakan gerakan pencegahan tindakan korupsi melalui: pertama, pada lingkungan keluarga: hidup ughari dengan penuh kebijaksanaan, hidup sewajarnya dengan penuh syukur, hidup dengan jujur dalam segala hal, dan hidup dengan iman yang teguh; kedua, pada lingkungan sekolah: pilihlah sekolah dengan baik dan benar, belajarlh untuk hidup bukan sekedar untuk nilai, bersyukurlah atas anugerah Tuhan yang Mahamurah dan Mahaadil, dan jadilah teladan yang baik bagi anak-anak; ketiga, pada lingkungan Gereja: terlibatlah aktif dalam kehidupan menggereja dan persoalan negara, bertanggungjawablah terhadap harta benda Gereja, dan terapkan profesionalitas dalam pengelolaan asset Gereja; keempat, pada lingkungan tempat kerja: bekerjalah dengan dedikasi, terimalah atau berilah imbalan atau honor atau gaji yang disepakati dengan penuh syukur, sebagai warga negara yang baik bayarlah pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya dengan penuh tanggung jawab, ikutilah aktivitas spiritual secara proporsional, dan buatlah penilaian yang rasional.

Nota Pastoral Tahun 2018 Tentang Panggilan Gereja Dalam Hidup Berbangsa. Dalam Nota Pastoral ini, ada beberapa pesan untuk diperhatikan Gereja Katolik terkait tahun politik adalah sebagai berikut: pertama, Bahwa Gereja katolik dalam kapasitasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia ikut merawat dan terlibat dalam penentuan masa depan bangsa. Peran utama Gereja dalam hal menata serta membangun bangsa yang pancasilais terletak pada pundak kaum awam, sedangkan para gembala umat diundang untuk mendampingi, meneguhkan, dan memberi teladan; kedua, Gereja Katolik menyayangkan situasi bangsa yang menghadapi rongrongan terhadap Pancasila oleh radikalisme dan terorisme. Kesatuan bangsa diciderai dengan sikap intoleran terhadap mereka yang berbeda keyakinan, serta diperparah oleh praktek politik dengan menggunakan SARA demi

mencapai kepentingan tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak dan keluhuran martabat manusia. Oleh karenanya Gereja Katolik harus hadir sebagai bagian utuh masyarakat untuk berdialog dengan masyarakat yang plural sambil menjadi instrumen cinta, perdamaian dan persahabatan; ketiga, Berkaitan dengan agenda politik Pilkada 2018 di 171 daerah, serta Pilkada dan Pilpres 2019, Gereja Katolik dalam hal ini para gembala umat, diharapkan hadir dan membimbing umatnya agar tidak terpecah-belah karena berbeda pilihan politik, berdaya tahan terhadap serbuan kampanye politik berbau SARA, serta mendorong kaum awam yang potensial untuk mengambil bagian dalam kontestasi politik tersebut; keempat, umat Katolik harus berpartisipasi dalam agenda politik tersebut dengan menggunakan hak politiknya secara bijak. Memilih calon pemimpin harus berdasarkan hati nurani dan bukan karena ikut-ikutan apalagi karena tekanan.

b) Surat Gembala

Surat gembala merupakan amanat atau pesan Uskup atau para Uskup kepada umat gembalaannya sebagai panduan dan pedoman persiapan bathin dalam perwujudan iman terkait kegiatan kerohanian maupun kemasyarakatan dalam semangat Injil. Para Uskup dalam persekutuan sebagai KWI pernah merumuskan surat gembala terkait kehidupan sosial politik, antara lain:

Surat Gembala KWI Menyambut Pemilihan Legislatif Tahun 2014.

Dalam surat gembala ini, para Uskup Indonesia menyampaikan beberapa pesan agar diperhatikan dan dipedomani umat Katolik dalam menyukseskan Pemilu legislatif 2014. Adapun pesan-pesan itu antara

lain: pertama, hak dan panggilan ikut serta dalam pemilu. Para Uskup Indonesia mengajak semua umat Katolik yang sudah memenuhi syarat Pemilu berpartisipasi dalam Pileg karena merupakan hak dan panggilan sebagai warga negara. Pemilihan itu dilakukan dengan cerdas dan sesuai dengan suara hati; kedua, kriteria calon legislatif. Umat Katolik diimbau agar memilih calon legislatif yang adalah menghayati nilai-nilai agama dengan baik dan jujur, orang baik, cinta damai, berpihak kepada rakyat kecil, peduli terhadap sesama, dan anti kekerasan, serta bersikap toleran antar hidup beragama dan peduli pada pelestarian lingkungan

hidup. Umat Katolik jangan terjebak dalam politik uang, tetapi usahakan dengan berbagai cara untuk mengenal para caleg; ketiga, kriteria partai politik. Para Uskup mengimbau supaya Umat Katolik memilih partai yang komitmen terhadap empat konsensus dasar kebangsaan dan mempertahankannya. Dianjurkan memilih partai yang memiliki calon legislatif dengan kemampuan memadai dan berwawasan kebangsaan yang benar; keempat, pengawasan atas jalannya pemilu. Umat Katolik diharapkan memantau dan mengawasi seluruh proses Pemilu agar tercipta Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; kelima, pemilu yang aman dan damai. Umat Katolik perlu tetap waspada terhadap usaha-usaha memecah-belah atau mengadu domba yang dilakukan untuk tercapainya target politik tertentu. Perlu partisipasi segenap umat dan masyarakat untuk menangkai kemungkinan terjadi hal tersebut, agar tercipta pemilu yang aman dan damai; keenam, calon legislatif. Kepada calon legislatif, para Uskup mengingatkan agar tetap memegang nilai luhur kemanusiaan, berjuang untuk kepentingan umum dengan integritas moral dan spiritual yang dalam.

Surat Gembala KWI Menyambut Pilpres 9 Juli 2014

Dalam surat gembala ini, para Uskup menyerukan beberapa hal yang menjadi perhatian umat Katolik, yaitu: pertama, memilih pemimpin yang mempunyai integritas moral; kedua, memilih pemimpin yang melayani dan memperjuangkan nilai-nilai sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja: memperjuangkan kebaikan bersama, menghormati kehidupan dan martabat manusia, mendorong dan menghayati semangat solidaritas dan subsidiaritas serta memperhatikan warga negara yang kurang beruntung; ketiga, umat Katolik bertanggung jawab terlibat dalam menjaga agar tidak terjadi kecurangan dalam pemilu; keempat, umat Katolik yang terlibat dalam kampanye hendaknya melakukannya dengan santun, dan beretika. Jangan menggunakan kampanye hitam dan jangan menggunakan isu SARA. Media massa memberitakan secara seimbang agar tercipta damai, kerukunan, persaudaraan, mencerdaskan, serta tidak melakukan penyesatan publik melainkan menjadi corong kebaikan dan kebenaran; kelima, umat Katolik mempertimbangkan dan menentukan pilihan dengan sungguh-sungguh

menggunakan hati dan pikiran yang jernih; keenam, umat Katolik harus memberikan dukungan dan loyalitas kepada presiden dan wakil presiden terpilih dan mengakhiri perbedaan pendapat dan pilihan politik ketika mereka dilantik.

## 2) Komisi Kerasulan Awam

Berkaitan dengan tugas Komisi Kerasulan Awam untuk membantu karya para Uskup tersebut, sejak tahun 2013, dalam sidang tahunan KWI diputuskan untuk fokus pada bidang sosial politik. Untuk itu, Komisi Kerawasulan Awam KWI telah melakukan beberapa hal dalam rangka pendidikan politik, yaitu<sup>72</sup>:

### a) Membuat buku terkait Politik dan mensosialisasikannya.

Maksud pembuatan buku ini adalah, agar umat katolik dapat membacanya untuk menambah wawasan tentang kehidupan politik bangsa dan mendorongnya untuk terlibat di dalam kehidupan politik bangsa serta bagi yang telah terlibat dalam politik bangsa dapat meneguhkannya dalam semangat iman kristiani;

### b) Mendampingi anggota DPD dan DPR RI.

Komisi Kerasulan awam KWI menyelenggarakan kegiatan rekoleksi dan acara tatap muka dengan anggota DPD dan DPR RI yang beragama Katolik yang juga melibatkan Uskup Ketua KWI dan Ketua Komisi Kerasulan Awam KWI. Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan mereka akan nilai-nilai kekatolikan yang harus diwujudkan dalam aktivitasnya sebagai anggota DPD maupun DPR RI, bahwa tujuan berpolitik adalah hanya untuk *bonum commune* (kesejahteraan bersama);

### c) Mendampingi dan membekali Ormas-Ormas Katolik di tingkat Nasional;

Komisi Kerasulan Awam selalu hadir dan melantik pengurus baru ormas-ormas Karolik di tingkat nasional yang dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kotbah dalam perayaan Ekaristi Kudus dapat mengandung pendidikan politik. Ataupun diadakan pembekalan sebelum atau sesudah perayaan Ekaristi Kudus tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan agar ormas-ormas Katolik diingatkan untuk memegang

<sup>72</sup> RD. Paulus Christian Siswantoko. Sekertaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia. Wawancara, tanggal 31 Mei 2022.

teguh ajaran Katolik dalam kiprahnya di masyarakat sebagai garam dan terang dunia.

- d) Koordinasi dan mendorong komisi kerasulan awam tingkat keuskupan terkait pelaksanaan kegiatan kerasulan awam di bidang politik.

Komisi Kerasulan Awam KWI koordinasi dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan Komisi Kerasulan Awam di tingkat Keuskupan maupun Regio. Komisi Kerasulan Awam KWI hadir sebagai narasumber maupun fasilitator dalam kegiatan tersebut untuk saling melengkapi dan memperkaya dalam karya kerasulan awam. Mataeri-materi pendidikan politik disampaikan pada kegiatan-kegiatan dimaksud.

### 3) Keuskupan-Keuskupan

Penanggung jawab upaya pendidikan politik di keuskupan adalah seorang Uskup dan dibantu oleh komisi kerasulan awam keuskupan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di tingkat keuskupan adalah:

#### a) Surat gembala

Uskup setempat biasanya mengeluarkan surat gembala untuk mengimbau dan mengajak umat keuskupannya terlibat dalam kegiatan politik bangsa. Biasanya menjelang pemilu legislatif dan pemilukada, Uskup mengeluarkan surat gembala yang menjadi panduan umatnya dalam terang iman untuk bertindak sesuai dengan ajaran iman Katolik dalam menghadapi hajat politik tersebut. Hal ini juga merupakan satu bentuk pendidikan politik karena mengarahkan umat untuk bertindak secara baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai Injil.

#### b) Rekoleksi Kategorial

Rekoleksi kategorial merupakan suatu kegiatan rekoleksi yang pesertanya merupakan kelompok umat berdasarkan kategori tertentu. Pejabat pemerintah dan anggota DPRD dapat dikategorikan menjadi satu kelompok peserta rekoleksi. Pada saat rekoleksi tersebut, Uskup dapat memberikan pendidikan politik bagi mereka agar dalam melaksanakan tugasnya selalu sesuai dengan ajaran iman Katolik.

#### c) Bulan Kebangsaan

Di beberapa Keuskupan menetapkan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan. Selama bulan itu, umat di Keuskupan diajak untuk merenung beberapa tema tentang kebersamaan, seperti

kebhinnekatunggalikaan, gotong royong, implementasi nilai-nilai Pancasila, dan dialog antaragama. Hal-hal ini merupakan dimensi-dimensi kehidupan yang harus terus digali dan dikembangkan untuk meneguhkan rasa cinta umat terhadap negara Indonesia yang majemuk ini. Selain nilai-nilai kebangsaan ini, dalam bulan kebangsaan itu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendalaman Ajaran Sosial Gereja terkait politik. hal ini dilakukan karena, masih sangat banyak umat Katolik yang belum mengenal dan mendalami Ajaran Sosial Gereja. Dan bagi aktor politik Katolik diharapkan semakin sadar dan dijiwai oleh nilai-nilai kebangsaan dan kekatolikan tersebut dalam berpolitik

d) Mempersiapkan Calon Pemilih Pemula

Kegiatan ini bersifat situasional, yaitu menjelang pemilihan umum legislatif maupun kepala daerah. Dalam kegiatan ini, calon pemilih pemula diajak untuk mengikuti pemilu dan dibekali agar memilih bukan asal nyoblos tetapi berdasarkan informasi yang cukup dan benar, memilih secara bertanggung jawab untuk kepentingan bersama.

e) Pendampingan dan pembekalan bagi Ormas-Ormas Katolik di tingkat daerah.

Kegiatan pendampingan dan pembekalan ini dimaksudkan agar ormas-ormas Katolik mengingat dan mewujudkan peran mereka sebagai garam dan terang dunia.

4) Paroki-Paroki

Penanggung jawab pastoral di Paroki adalah Pastor Paroki. Dalam pelayanan di bidang kerasulan awam, Pastor Paroki dibantu Seksi Kerasulan Awam Paroki. Adapun kegiatan terkait pendidikan politik yang dilakukan di Paroki adalah:

a) Rekoleksi Kategorial

Pastor paroki menyelenggarakan rekoleksi kategorial yang dapat melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan desa dan kelurahan dalam rangka pendidikan politik. Orang Muda Katolik (OMK) yang ada dalam wilayah parokinya dibekali dengan pendidikan politik dalam karya Pastoral Paroki.

b) Sosialisasi Surat Gembala Uskup dan KWI

Biasanya surat gembala Uskup dan KWI (termasuk terkait pendidikan politik) disosialisasikan di Paroki-Paroki, agar seluruh umat mendapat pengetahuan dan amanat yang tertuang dalam surat gembala tersebut.

c) Kotbah yang berisikan pendidikan Politik

Setiap kali merayakan Ekaristi Kudus, Pastor yang memimpin perayaan tersebut dapat menyampaikan kotbah-kotbah yang mengandung makna pendidikan politik bagi umatnya.

5) Ormas-Ormas Katolik

Ormas-Ormas Katolik seperti Pemuda Katolik, Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), terutama ditingkat nasional mengadakan kegiatan-kegiatan organisasi dan peremajaan badan pengurus organisasinya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala sesuai dengan anggaran dasar dan program kerja organisasi.

#### 14. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Pada Gereja Katolik

Dalam perkembangan dewasa ini, Gereja Katolik dinilai kurang tertarik dan terlibat dalam urusan politik bangsa dan Negara. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Teologi Indonesia (2009) menyatakan bahwa Gereja Katolik Indonesia belakangan ini kurang efektif merespon persoalan sosial politik. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah: pertama, adanya sebagian besar umat Katolik berpandangan bahwa politik itu kotor, licik, penuh intrik dan persaingan. Politik dijadikan sebagai sarana oleh penguasa untuk menindas rakyat. Penguasa menggunakan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya dengan alasan demi kepentingan rakyat; kedua, kurangnya penekanan fungsi diakonia Gereja Katolik sehingga warga Gereja Katolik kurang peduli terhadap isu-isu politik; ketiga, pendidikan umat beriman termasuk calon Pembina iman yakni, calon katekis, calon imam dan calon religious, kurang memberi perhatian pada dimensi sosial politik; keempat, Gereja kurang mampu mengkomunikasikan pandangan dan sikap sosial politiknya kepada umat katolik

dan masyarakat luas, sehingga pandangan-pandangan Gereja tidak dimengerti dan dipahami oleh mereka (KWI, Tanggung Jawab, 2009, Muliawan, 2008)<sup>73</sup>.

Ansel Alaman dalam bukunya *Politik Katolik & Kaderisasi Kebangsaan* juga mengemukakan beberapa alasan rendahnya respons umat atau tokoh katolik tentang politik, yaitu<sup>74</sup>: pertama, kemungkinan karena rendahnya kebiasaan berorganisasi di kalangan umat sebab terlalu kuat otoritas pemimpin dalam hal ini hierarki. Akibatnya, pergerakan umat termasuk berorganisasi hampir pasti tidak terlepas dari pengaruh pimpinan agama; kedua, banyak umat katolik terlebih di daerah pedalaman tidak mandiri dalam mengambil keputusan karena dibayangkan otoritas Pastor atau pimpinan dewan paroki. Di daerah pedalaman, umumnya Pastor yang berpendidikan tinggi sedangkan kebanyakan umatnya berpendidikan SLTA, SMP dan SD bahkan putus sekolah; ketiga, partai politik gagal berperan sebagai agen memobilisasi masyarakat berpartisipasi dalam politik. Banyak partai politik tidak menjalankan kaderisasi, pendidikan politik, bahkan mendekati rakyat hanya saat menjelang pemilihan umum.

Menanggapi kenyataan politik sebagaimana dikemukakan di atas, sebetulnya Gereja Katolik cukup prihatin dengan kondisi kehidupan politik di tanah air Indonesia, sehingga dengan beberapa cara telah dilakukan kegiatan pendidikan politik. Pelaksanaan pendidikan politik itu dimaksudkan juga agar umat Katolik terlibat dalam upaya menciptakan kondisi kehidupan politik di tanah air yang semakin baik. Dari segi kelembagaan, Gereja Katolik memiliki struktur yang sangat kuat dan berjenjang. Hal ini sangat memungkinkan pelaksanaan pendidikan politik dijalankan dengan baik jika ada perhatian, komitmen dan kerja sama yang baik dari semua tingkatan pimpinan Gereja Katolik di Indonesia. Namun dalam upaya pelaksanaan pendidikan politik dalam Gereja Katolik, terdapat beberapa kendala atau hambatan-hambatan, yaitu antara lain:

- 1) Kurangnya perhatian hierarki Gereja Katolik di bidang politik.

Menurut RD. Paulus Christian Siswantoko<sup>75</sup>, masih banyak hierarki terutama imam-imam Katolik yang masih memandang tidak perlu campur dalam urusan pendidikan politik bagi umatnya. Padahal hierarki memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan politik dalam Gereja Katolik. Hierarki memiliki posisi

<sup>73</sup> Hipolitus K. Kewuel dan Gabriel Sunyoto (Editor). 2010. *12 Pintu Evangelisasi Menebar Garam di Atas Pelangi: 50 Tahun Widya Yuwana Madiun*. Madiun: Winapress. hlm. 189.

<sup>74</sup> Ansel Alaman. 2019. *Politik Katolik & Kaderisasi Kebangsaan*. Jakarta: Penerbit Obor. hlm. 57-62.

<sup>75</sup> Ibid.

strategis untuk menyampaikan hal-hal penting terkait politik dan didengarkan oleh masih banyak umat. Hal ini juga dipengaruhi oleh persepsi hierarki tentang pendidikan politik dan berpolitik praktis. Ada yang menyangka, bahwa berbicara tentang etika politik dan penyadaran umat untuk terlibat secara benar dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik sudah tergolong berpolitik praktis. Padahal, hal tersebut merupakan bagian dari pendidikan politik yang merupakan tanggung jawab hierarki untuk melaksanakannya. Hal ini dibenarkan oleh Roberth Hammar<sup>76</sup>, salah satu tokoh awam Katolik di Manokwari, bahwa kebanyakan imam-imam Katolik atau Pastor-Pastor lebih fokus dengan urusan kerohanian semata dan tidak mempunyai visi di bidang politik. Akibat tidak ada pendampingan yang berarti bagi awam Katolik yang berkecimpung di bidang pemerintahan maupun politik dapat menjadi salah satu alasan mereka tidak berani mengambil resiko bertindak benar sesuai dengan ajaran iman Katolik;

- 2) Kaderisasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Katolik masih belum maksimal. Hingga kini, terdapat beberapa Ormas katolik yang telah eksis, yaitu: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Katolik, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), dan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA). Ormas-Ormas Katolik ini merupakan tempat untuk mengkader orang-orang Katolik yang akan terlibat secara aktif dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Ormas-ormas ini merupakan sarana efektif untuk melaksanakan pengkaderan melalui pelaksanaan pendidikan politik, karena memiliki organ, kepengurusan, anggota dan berada di pusat sampai ke daerah-daerah. Namun RD. Sisantoko menilai, Ormas-Ormas ini belum secara maksimal melaksanakan pengkaderan bagi anggotanya untuk terlibat secara aktif dan berkualitas dalam berpolitik<sup>77</sup>. Hingga kini belum ada paket pembinaan dan pendidikan pengkaderan berjenjang dari Ormas-Ormas dimaksud, walaupun ada belum dilaksanakan secara konsisten dan maksimal.

Hambatan lainnya, bahwa ormas-ormas Katolik ini hidup dan bergiat lancar di tingkat Nasional dan Keuskupan Agung Jakarta dan beberapa Keuskupan

<sup>76</sup> Roberth Kurniawan Ruslak Hammar, Tokoh Umat Katolik di Manokwari, Wawancara, Jakarta, 07 Juni 2022.

<sup>77</sup> RD. Paulus Christian Siswantoko. Loc.Cit.

lainnya. Ormas-Ormas di tingkat daerah yakni di kebanyakan Keuskupan-keuskupan di daerah sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain Ormas-Ormas katolik ini, sebetulnya dalam Gereja Katolik terdapat kelompok-kelompok kategorial yang dapat dijadikan sasaran pendidikan politik. Kelompok Orang Muda Katolik (OMK) misalnya, walaupun bukan Ormas tetapi dapat dilaksanakan pendidikan Politik bagi mereka sebagai persiapan terjun ke dunia politik dengan berkecimpung dalam pemerintahan atau masuk Ormas katolik maupun Partai Politik. Pendampingan terhadap OMK dengan pembinaan dan pendidikan politik belum juga maksimal karena kebanyakan lebih fokus pada hal-hal yang bersifat rohani saja yang dianggap lebih mendesak;

3) Inferioritas di kalangan umat Katolik.

Rasa inferior ini muncul dalam diri sebagian umat Katolik karena minoritas di negara ini. Karena jumlahnya sedikit menyebabkan mereka takut untuk bersuara, takut berbeda, takut tampil dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih mencari titik aman, dan menyibukan diri dengan urusan dirinya sendiri tanpa terlibat memikirkan urusan bangsa dan negara. Menyangkut pemilihan, suara mereka dititipkan pada yang mayoritas untuk menghindari konflik dan lain sebagainya. Menurut pengalaman RD. Yohanes K. Jehadut, ada sekelompok umat tertentu yang merasa trauma jika berurusan dengan bidang politik. Hal ini disebabkan karena mereka pernah menjadi korban akibat pertarungan politik yang berujung pada kerusuhan;

4) Umat awam katolik masih sangat bergantung pada hierarki.

Menurut bapak Robert Hammar, umat awam terutama di daerah-daerah terlalu patuh kepada hierarki. Artinya jika hierarki tidak mendorong untuk terlibat dalam politik praktis maka umat tidak berani terlibat dalam politik praktis. Akhirnya menurutnya, umat hanya jago kandang. Umat hanya berani dengan urusan internal Gereja tetapi tidak ada keberanian untuk tampil di dalam masyarakat yang majemuk yakni terlibat dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, menurut RD. Yohanes K. Jehadut, sebagian umat Katolik merasa nyaman hanya berada dalam grupnya sendiri yang sesama anggota Gereja daripada berurusan dengan masyarakat yang beragam. Mereka lebih memilih terlibat dari urusan rohani atau gerejani daripada urusan politik yang penuh tantangan dan bisa terjadi benturan-benturan dalam masyarakat.

## 15. Upaya Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan Politik Pada Gereja Katolik

Ada beberapa kenyataan yang menunjukkan bahwa sangat mendesak untuk dilaksanakannya pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari segi tingkat pendidikan, kebanyakan penduduk Indonesia berpendidikan rendah yakni tamat SMA, tamat SMP, tamat SD dan bahkan buta huruf. Dipandang dari segi perekonomian, masih banyak penduduk Indonesia yang menganggur dan hidup dalam kemiskinan. Dari segi penyelenggaraan pemerintahan, masih terdapat banyak praktek korupsi dalam berbagai bentuk termasuk jual beli jabatan. Dilihat dari aspek pelaksanaan Pemilu yang dimainkan oleh partai politik, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan disana terjadi semacam efek domino yang pada akhirnya berujung pada korupsi dan kecurangan-kecurangan dalam Pemilu itu sendiri. Kecurangan-kecurangan itu dapat berupa, politik identitas, manipulasi suara, politik uang dan sebagainya yang merusak citra demokrasi bangsa dan negara.

Menyimak kenyataan kehidupan politik bangsa yang masih belum sesuai dengan yang semestinya ini, segala komponen bangsa harusnya terpenggil untuk memperbaikinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan politik.

Gereja Katolik sebagai salah satu komponen bangsa, hendaknya meningkatkan perhatian dan keterlibatannya dalam kehidupan politik bangsa ini dengan meningkatkan pelaksanaan pendidikan politik dalam Gereja Katolik. Kegiatan pendidikan politik ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan oleh Gereja Katolik karena: tersedianya dasar pelaksanaan pendidikan politik dalam Kitab Suci maupun Ajaran Sosial Gereja; adanya ormas-ormas katolik dan organisasi intra Gereja yang dapat menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan politik; adanya sekolah-sekolah katolik yang dapat disisipkan bidang studi tertentu sebagai bentuk pendidikan politik; ada kewenangan yang diberikan Gereja Kudus kepada Hierarki Gereja Katolik untuk melaksanakan pembinaan atau pendidikan bagi umatnya baik secara kategorial maupun dalam lingkup teritorial terkait politik; dan ada pula komisi Kerasulan awam yang berperan sebagai pendamping para awam Katolik untuk terlibat dalam politik praktis dan pemerintahan.

Hal-hal ini, sangat menunjang pelaksanaan pendidikan politik dalam Gereja Katolik dan Gereja Katolik telah melaksanakan pendidikan politik tersebut. Namun pelaksanaan pendidikan politik pada Gereja Katolik tersebut dinilai belum

maksimal dengan alasan-alasan atau hambatan-hambatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, Gereja Katolik perlu mengupayakan peningkatan pelaksanaan pendidikan politik bagi umatnya, melalui:

1) Meningkatkan sinergitas antara Umat Awam dan Hierarki.

Konsili Vatikan II mempresentasikan pemahaman yg jauh lebih luas menyangkut cara-cara pada mana kaum awam dan hierarki bekerjasama satu sama lain pada karya pelayanan Gereja. Konsili mengajarkan bahwa baik klerus juga awam wajib melihat diri mereka menjadi saudara dan saudari lantaran seluruh umat beriman mempunyai hak yang sama pada bidang kerasulan Gereja. Hal ini secara eksplisit dinyatakan pada dekret *Apostolicam Actuositatem* pada mana ditegaskan bahwa Uskup, pastor paroki dan imam lainnya wajib menjaga supaya tetap berpihak pada fakta bahwa hak dan kewajiban melaksanakan kerasulan umum dalam Gereja merupakan tanggung jawab seluruh umat beriman, baik klerus maupun awam, dan bahwa pada karya pembangunan Gereja itu, kaum awam mempunyai tempatnya sendiri. Atas dasar itu maka para klerus wajib bekerja sebagai saudara dengan umat awam di dalam Gereja dan buat Gereja<sup>78</sup>.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa, dalam Gereja, antara awam dan klerus dihubungkan oleh misi bersama untuk membangun Gereja secara kedalam maupun keluar. Hubungan ini harus didasarkan atas sikap saling membutuhkan, yaitu kaum klerus harus bekerja di antara kaum awam dan kaum awam diperkuat oleh hadirnya dan dukungan kaum klerus.

Terkadang, hal ini disalah mengerti oleh kaum awam dan klerus atau hierarki dalam urusan keterlibatan dalam bidang politik. Ada sebagian kaum awam yang menilai klerusnya berpolitik praktis apabila berbicara tentang kebenaran dan etika dalam berpolitik. Padahal berbicara tentang hal itu adalah tanggung jawab klerus. Ataupun kaum awam tertentu menganggap klerus tidak mendukungnya dalam kontestasi politik, ketika tidak membantunya secara langsung untuk memenangkan konstetasi politik entah sebagai legislatif maupun kepala daerah. Padahal ada umat katolik yang lain juga berada dalam kontestasi yang sama, dan klerus tidak boleh berpolitik praktis, seperti kampanye memenangkan calon tertentu apalagi menjadi anggota dan

<sup>78</sup> Bdk. R. Hardawiryana (Penerj.). 1993. *Dokumen Konsili Vatikan II, Dekrit Apostolikam Actuositatem Art. 25*. Op. Cit. hlm. 222.

pengurus parpol. Sedangkan dari pihak klerus, ada klerus tertentu yang menganggap berpolitik itu bukan urusannya, sehingga kurang memberikan pendidikan politik dan pendampingan kepada umatnya yang terjun di dunia politik. Ataupun ada klerus tertentu yang secara terang-terangan mendukung dan berkampanye memenangkan salah satu umatnya dari beberapa umat yang lain yang menjadi calon legislatif maupun kepala daerah.

Kesalahpahaman ini akan menyebabkan hubungan tidak harmonis antara klerus dan awam dalam kehidupan menggerja dan bermasyarakat. Untuk itu, masing-masing, baik klerus maupun awam belajar untuk menyadari akan tugas dan batas-batasnya dalam karya kerasulan di bidang politik. Klerus hadir dalam karya kerasulan di bidang politik sebagai Pembina, pengajar yang mempersiapkan dan mendampingi semua umat awam yang terpanggil di bidang politik. Klerus pun bertanggung jawab memberikan pencerahan politik kepada seluruh umat beriman dalam Gereja. Sedangkan kaum awam harus menyadari, bahwa keterlibatan dalam politik merupakan panggilan untuk menata dunia. Kekhasan kaum awam adalah 'keduniawiannya'. Kaum awam bertindak dalam kegiatan politik atas nama dirinya sendiri bukan atas nama Gereja, di sanalah kaum awam mewujudkan panggilannya dengan mengikuti suara hatinya dan ajaran Injil serta ajaran sosial gereja. Jika hubungan ini dipahami dengan baik antara klerus dan awam dalam Gereja, maka karya kerasulan di bidang politik akan berjalan dengan lebih baik;

2) Optimalisasi Sinergitas antarKeuskupan dalam pelaksanaan Pendidikan Politik;

Sejak tahun 2015, Konferensi Wali Gereja Indonesia bersepakat memberi perhatian pada kerasulan di bidang politik. Dalam pelaksanaannya, tidak semua keuskupan melaksanakannya secara konsisten. Paling tidak, perhatian di bidang politik hanya terjadi menjelang hajatan politik entah pileg, pilpres maupun pilkada. Hal ini disebabkan antara lain karena Gereja Katolik belum memiliki *road map* kaderisasi. Itulah yang ditagih dan diharapkan oleh J. Kristiadi, bahwa Gereja Katolik dalam hal ini Komisi Kerasulan Awam KWI harus memiliki peta jalan atau *road map* untuk pendidikan politik bagi umat awam yang nantinya bergerak di bidang kemasyarakatan sebagai pejabat publik di kantor-kantor pemerintahan ataupun sebagai politisi. *Road map* ini menurutnya penting dan mendesak sekarang agar mencetak kader Katolik dan

bangsa dengan mutu yang unggul, dapat dipercaya, bertanggung jawab, adil, demokratis dan ‘tidak doyan uang panas’<sup>79</sup>. Jika *road map* itu sudah tersedia, maka setiap Keuskupan di Indonesia akan sinergi dalam pelaksanaan Pendidikan Politik bagi umatnya.

### 3) Pengembangan Sistem Kerja Jejaring

Komisi Kerasulan KWI maupun Keuskupan serta Seksi Kerasulan Awam di Paroki-Paroki dapat bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pembekalan bagi Orang Muda Katolik (OMK). Dalam kegiatan dimaksud, diberikan pendidikan politik agar mereka menjadi siap untuk terjun dalam dunia politik dengan iman dan moral Kristiani yang tangguh.

Komisi Kerasulan Awam dapat menjalin kerja sama dengan Komisi Katekese agar dalam kegiatan katekese bagi umatnya, yakni Anak-Anak (AA), Orang Muda Katolik (OMK) dan Orang Dewasa (OD), diberikan juga materi pendidikan politik.

Dalam kerjasamanya itu, dapat juga menggandeng Bimas Katolik pada Kementerian Agama RI, agar dalam penyusunan buku Pendidikan Agama Katolik bagi sekolah-sekolah dimuat materi mengenai pendidikan politik.

Komisi Kerasulan Awam juga dapat bekerja sama dengan Yayasan-Yayasan Pendidikan Katolik agar pendidikan politik dimasukkan dalam bidang studi muatan lokal pada sekolah-sekolah Katolik.

### 4) Meningkatkan Pemanfaatan Media Sosial untuk Pendidikan Politik;

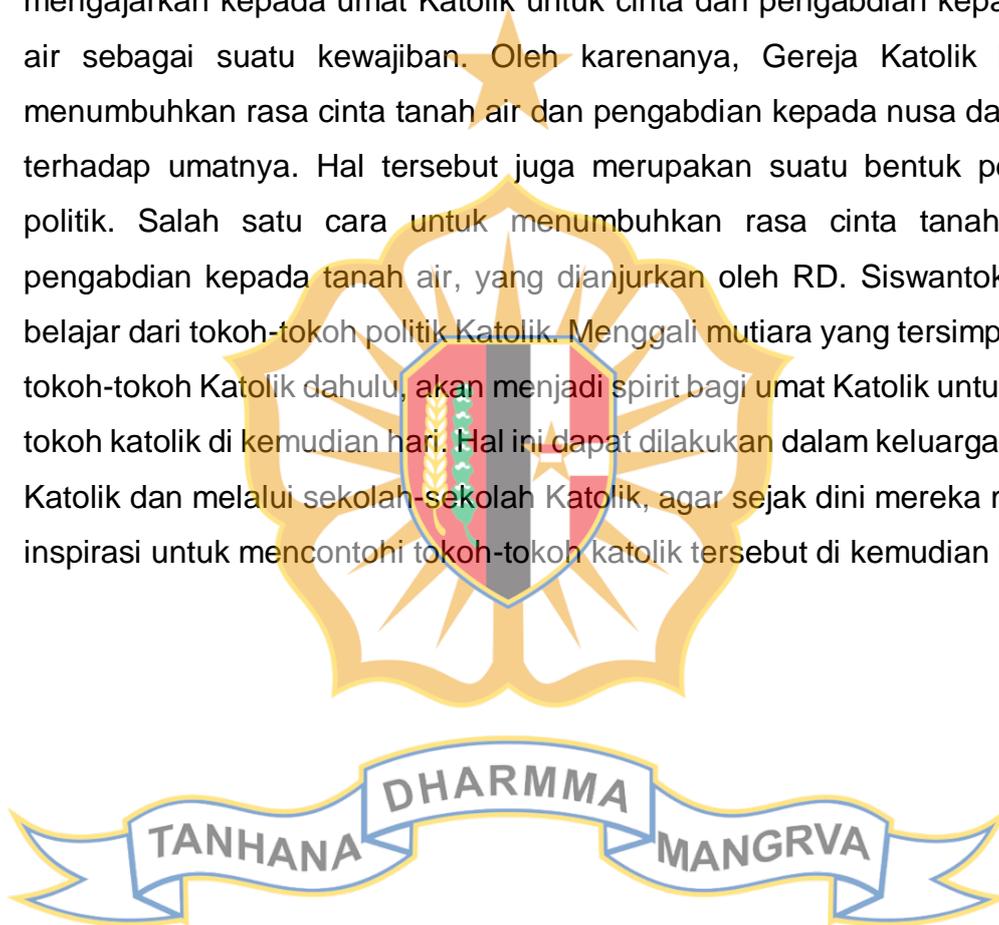
Hampir semua umat Katolik memiliki hand phone dan mengoperasikannya. Apabila media sosial yang ada seperti, youtube, tik tok, facebook, Instagram, twitter dan lainnya, dipakai untuk penyampaian pendidikan politik maka akan efektif untuk penyebarannya karena dapat menjangkau banyak orang. Hendaknya juga, keuskupan-keuskupan bahkan paroki-paroki, ormas-ormas katolik dan organisasi intra Gereja yang ada memiliki situs internet atau blok atau akun tersendiri yang dapat menampilkan bagian tentang pendidikan politik. Sarana-sarana ini sudah mulai digunakan dalam kalangan Gereja

<sup>79</sup> Mathias Hariyadi. 2016. *Gereja Katolik Berpolitik, J. Kristiadi Tantang KWI sediakan Roadmap Cetak Kader (2)*. <http://www.dokpenkwi.org/2016/02/28/gereja-katolik-berpolitik-j-kristiadi-tantang-kwi-sediakan-roadmap-cetak-kader-2/>. 28 Februari. diakses tanggal 10 Juni 2022, pukul 20.41 WIB.

sebagai sarana pewartaan, hanya perlu ditingkatkan pewartaan mengenai pendidikan politik di dalamnya<sup>80</sup>.

5) Penanaman Nilai Cinta Tanah Air;

Dalam Katekismus Gereja Katolik art. 2239<sup>81</sup>, menyatakan bahwa cinta kepada tanah air serta pengabdian untuk tanah air merupakan kewajiban terima kasih dan sesuai dengan tata cinta kasih. Ketaatan kepada wewenang yang sah dan kesiagaan untuk kesejahteraan umum menghendaki agar para warga negara memenuhi tugasnya dalam kehidupan persekutuan negara. Ketentuan ini mengajarkan kepada umat Katolik untuk cinta dan pengabdian kepada tanah air sebagai suatu kewajiban. Oleh karenanya, Gereja Katolik berupaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan pengabdian kepada nusa dan bangsa terhadap umatnya. Hal tersebut juga merupakan suatu bentuk pendidikan politik. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan pengabdian kepada tanah air, yang dianjurkan oleh RD. Siswantoko adalah belajar dari tokoh-tokoh politik Katolik. Menggali mutiara yang tersimpan dalam tokoh-tokoh Katolik dahulu, akan menjadi spirit bagi umat Katolik untuk menjadi tokoh katolik di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan dalam keluarga-keluarga Katolik dan melalui sekolah-sekolah Katolik, agar sejak dini mereka mendapat inspirasi untuk mencontohi tokoh-tokoh katolik tersebut di kemudian hari<sup>82</sup>.



<sup>80</sup> Bdk. RD. Paulus Christian Siswantoko. Loc. Cit.

<sup>81</sup> Konferensi Waligereja Indonesia.2007. Katekismus Gereja Katolik Indonesia. Op. Cit. hlm. 382.

<sup>82</sup> Bdk. Ibid.

## BAB IV PENUTUP

### 15. Simpulan

Menyimak kenyataan kehidupan politik bangsa yang ditandai dengan maraknya korupsi dan jual beli jabatan, kecurangan dalam pemilu seperti politik identitas, politik uang dan adanya golput, Gereja Katolik terpanggil untuk terlibat dalam upaya memperbaiki tatanan kehidupan politik bangsa tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan Gereja Katolik untuk memperbaiki rusaknya keadaban politik adalah melalui pendidikan politik bagi umat Katolik yang terlibat atau akan terlibat dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Pendidikan atau pembinaan bagi umat katolik atau kaum awam agar berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa dan negara ini juga merupakan amanat Konsili Vatikan II sebagaimana dikatakan dalam *Gaudium et Spes* artikel 75.

Pelaksanaan pendidikan politik pada Gereja Katolik tersebut telah dilakukan oleh: a. Konferensi Wali Gereja Indonesia melalui Nota Pastoral dan Surat gembala; b. Komisi Kerasulan Awam KWI melalui pembuatan buku terkait politik dan mensosialisasikannya, mendampingi dan membekali anggota DPD dan Legislatif (DPR RI), mendampingi dan membekali ormas-ormas katolik di tingkat Nasional, dan Koordinasi serta mendorong komisi kerasulan awam tingkat keuskupan terkait pelaksanaan kegiatan kerasulan awam di bidang politik; c. Keuskupan-keuskupan melalui: Surat Gembala Uskup, Rekoleksi Kategorial, penyelenggaraan bulan kebangsaan, mempersiapkan calon pemilih pemula dan pendampingan dan pembekalan bagi ormas-ormas Katolik di daerah; d) Paroki-Paroki melalui: rekoleksi kategorial, sosialisasi surat gembala Uskup dan KWI, dan kotbah yang bermuatan pendidikan politik; e) Ormas-ormas katolik melalui: kegiatan pengkaderan dan peremajaan badan pengurus.

Namun, pendidikan politik yang telah dilaksanakan tersebut dinilai belum optimal. Terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala pelaksanaan pendidikan politik yaitu kurangnya perhatian hierarki di bidang pendidikan politik, kaderisasi dalam ormas belum maksimal, adanya rasa inferior pada umat Katolik dan kaum awam yang masih merasa bergantung pada hierarki.

Oleh karena itu, perlu diupayakan sinergitas antara kaum awam dan hierarki dalam bidang karya kerasulan awam, peningkatan sinergitas antarkeuskupan sebagai kesatuan dalam KWI dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi umatnya, pengembangan sistem kerja jejaring, optimalisasi penggunaan media sosial untuk pendidikan politik dan penanaman nilai cinta tanah air bagi umat katolik sejak dini.

Penguatan pendidikan politik pada Gereja Katolik ini dipandang penting karena sejalan dengan upaya negara untuk mendorong adanya pendidikan politik bagi warga negara maupun anggota partai politik. Maksud dan tujuan akhir pendidikan politik agar mencapai *bonnum commune* serentak ketahanan nasional tangguh.

## 16. Rekomendasi

Menyimak betapa pentingnya peningkatan pelaksanaan pendidikan politik pada Gereja Katolik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, yakni:

### a. Komisi Kerasulan Awam KWI:

- 1) Membuat modul atau peta jalan pendidikan politik sebagai materi pembinaan atau pendampingan berjenjang yang menjadi acuan seragam bagi komisi kerawam di tingkat keuskupan se-Indonesia.
- 2) Bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan untuk memasukan materi pendidikan politik dalam pendampingan bagi Orang Muda Katolik (OMK).
- 3) Bekerja sama dengan Komisi Katekese agar memasukan materi pendidikan politik dalam kegiatan katekese bagi umat.
- 4) Bersama Komisi Katekese bekerja sama dengan Bimas Katolik Kementerian Agama RI untuk memasukan materi pendidikan politik dalam buku Pendidikan Agama Katolik di Sekolah-Sekolah.

### b. Komisi Kerasulan Awam Keuskupan

- 1) Meningkatkan pendidikan politik bagi umat
- 2) Menghidupkan dan/atau meningkatkan pendampingan bagi ormas-ormas Katolik di daerah.
- 3) Bekerja sama dengan komisi kepemudaan dan komisi katekese keuskupan untuk memasukan materi pendidikan politik pada pendampingan OMK dan katekese umat.

4) Bekerja sama dengan yayasan-yayasan pendidikan katolik agar memasukan materi pendidikan politik dalam kurikulum sekolah-sekolah katolik.

c. Keuskupan-Keuskupan se-Indonesia

Menyatakan dan mewujudkan komitmen yang sama untuk menaruh perhatian pada pendidikan politik dalam menjawab persoalan bangsa dan negara di bidang politik.

d. Paroki-Paroki

Mengadakan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik bagi umatnya, mengikuti modul pendidikan politik yang telah disiapkan ataupun dibuat sendiri sesuai dengan keadaan setempat.

e. Ormas-Ormas Katolik

1) Membuat paket kaderisasi berjenjang dan berkesinambungan yang dilaksanakan secara konsisten.

2) Menumbuhkan dan menghidupkan kembali ormas-ormas Katolik di daerah-daerah.

f. Hierarki

Mengupayakan sosialisasi Ajaran Sosial Gereja terkait peran kaum awam dalam dunia. Terlebih berkaitan dengan sikap dan kesaksian kaum awam dalam dunia politik maupun pemerintahan.

g. Bimas Katolik Kementerian Agama RI

Memasukan materi pendidikan politik dalam buku Pendidikan Agama Katolik bagi sekolah-sekolah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Alaman, Ansel. 2019. Politik Katolik & Kaderisasi Kebangsaan. Jakarta: Penerbit Obor.
- Alfian. 1981. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Beny Wijayanto, Antonius, dkk. 2018. Peran Serta Umat Katolik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Danan Widharsana, Petrus. 2018. Mengamalkan Pancasila dalam terang Iman Katolik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- \_\_\_\_\_, dan Victorius Rudy Hartono. 2017. Pengajaran Iman Katolik. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
- Gonggong, Anhar, 2012, Mgr. Albertus Soegijapranata: Antara Gereja dan Negara, Jakarta: Grasindo.
- Habibi, Muhammad, 2017. Analisis Politik Identitas Di Indonesia. Working Paper. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hardawiryana, R. (Penerj.).1999. Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari “Rerum Novarum” sampai “Gentesimus annus”. Edisi kedua April 2002. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- \_\_\_\_\_. 2002. Kumpulan Dokumen Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini. 1996. Pendidikan Politik. Bandung: Mandar Maju.
- Kewuel, Hipolitus K, dan Gabriel Sunyoto (Editor). 2010. 12 Pintu Evangelisasi Menebar Garam di Atas Pelangi: 50 Tahun Widya Yuwana Madiun. Madiun: Wina Press.
- Konferensi Waligereja Indonesia. 1993. Dokumen Konsili Vatikan II, Jakarta: Dokpen KWI.
- \_\_\_\_\_. 1996. Iman Katolik. Jakarta: Obor.
- \_\_\_\_\_. 2000. Himpunan Direktorium Komisi, Lembaga, Sekertariat, Departemen Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Sekertariat Jenderal KWI.
- \_\_\_\_\_. 2007. Katekismus Gereja Katolik Indonesia. Jakarta: DokPen KWI.
- \_\_\_\_\_. 2017. Nota Pastoral KWI 2017: Mencegah dan Memberantas Korupsi. Jakarta: DokPen KWI.

Mulyono, Hari, dkk. 2022. Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Na'im, Akhsan, dan Hendry Syaputra. 2011. Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Ricklefs, M.C., 2005, Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Surbekti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yuliarto, Achmad, dkk. 2022. Bahan Ajar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar, Sub Bidang Studi Pancasila. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

### Jurnal Ilmiah

Cipta, Samudera Eka, 2020, Jurnal, 100% Katolik 100% Indonesia: Suatu Tunjauan Historis Perkembangan Nasionalisme Umat Katolik di Indonesia, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, Vol 14, No. 1, Januari-Juni 2020

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

### Internet

<https://nasional.tempo.co/read/1556554/bansoet-terima-buku-ksad-dudung-tentang-gerakan-intoleransi>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/284269/survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>

<https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45629345>

<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>

<https://www.mirifica.net/2007/03/08/gereja-dan-politik/>

- <https://katolisitas.org/unit/apakah-arti-gereja/>
- <https://jamberita.com/read/2022/02/08/5972089/politik-identitas-etnis-dalam-demokrasi/>,
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/14/08475971/ray-rangkuti-luka-akibat-politik-identitas-pilkada-dki-2017-belum-sembuh?page=all>,
- [https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi\\_puskapol/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019-2.html](https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019-2.html)
- <https://mediaindonesia.com/opini/205379/menguatnya-intoleransi-dan-politik-identitas>,
- [http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/6\\_Data-Partisipasi-Pemilu-dan-Pilkada.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/6_Data-Partisipasi-Pemilu-dan-Pilkada.pdf)
- <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persentase-golput-pemilu-legislatif-dan-pemilu-presiden-1971-2019-1601357218>,
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir>
- <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>,
- <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202021.pdf>,
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>,
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/20/hanya-002-penduduk-indonesia-berpendidikan-hingga-s3-pada-juni-2021>
- <https://www.bps.go.id/indicator/28/102/1/persentase-penduduk-buta-huruf.html>
- <https://news.detik.com/berita/d-4632837/parpol-dinilai-belum-maksimal-melaksanakan-pendidikan-politik>,
- <https://www.liputan6.com/news/read/4017920/parpol-belum-maksimal-melaksanakan-pendidikan-politik>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220118/9/1490228/kemiskinan-ri-di-akhir-2021-turun-begini-komentar-kemenkeu>,
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>.
- <https://data.tempo.co/data/1261/bps-tingkat-pengangguran-terbuka-pada-agustus-2021-turun-058-persen-dibanding-agustus-2020>,
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>
- <https://media.neliti.com/media/publications/49956-ID-kewarganegaraan-suku-bangsa-agama-dan-bahasa-sehari-hari-penduduk-indonesia.pdf>

<https://www.kompasiana.com/yulius88910/6163c75e259d5c20984d7592/>  
<https://sanyospwt.com/2018/07/15/hirarki-dalam-gereja-katolik/>).  
<https://www.kawali.org/profil-kwi/>  
<https://ms.wikipedia.org/wiki/hierarki.html>  
<https://ms.wikipedia.org/wiki/Keuskupan>.  
<https://trinitas.or.id/gereja-dan-paroki/121-apa-itu-paroki.html>;  
<https://ms.wikipedia.org/wiki/Keuskupan>).  
<http://www.dokpenkwi.org/2016/02/28/gereja-katolik-berpolitik-j-kristiadi-tantang-kwi-sediakan-roadmap-cetak-kader-2/>  
<http://ejurnal.stfkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/download/89/73>,  
<https://news.unika.ac.id/2014/05/soegija-dan-keluarga/>,  
<https://www.kompasiana.com/krisibu/>  
<https://kembangkan-pendidikan-berasrama/>  
<http://sanyospwt.com/2018/07/15/hirarki-dalam-gereja-katolik/>  
<http://katolisitas.org/unit/bagaimana-secara-garis-besar-sejarah-gereja-katolik-di>  
<https://www.kaj.or.id/keuskupan-agung-jakarta/sejarah-singkat-keuskupan-agung-jakarta>  
<https://www.sesawi.net/satya-lencana-kebudayaan-untuk-romo-van-lith-sj-atas-jasanya->  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/31/08080091/kongres-sumpah-pemuda-ternyata-pernah-digelar-di-area-gereja-katedral?page=all>  
<https://penakatolik.com/2022/06/01/soekarno-ende-dan-gereja-katolik/>  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/113711569/respons-vatikan-terhadap-kemerdekaan-indonesia?page=all>  
<https://atmajaya.ac.id/web/Konten.aspx?gid=highlight&cid=I-JKasimo-Sosok-yang-Tegas-Berprinsip-Teguh-dan-Cinta-Kebenaran>  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam#:~:>

## Wawancara

Narasumber 1

Nama : RD. Paulus Christian Siswantoko.

TTL : Kulon Progo, 30 Juni 1973.

Jabatan : Sekertaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia

Alamat : Jl. Cikini 2 nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat.

Narasumber 2:

Nama : RD. Yohanes K. Jeharut.

TTL : Ruteng, 30 Desember 1974.

Jabatan : Sekertaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI

Alamat : Jl. Cikini 2 Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat.

Narasumber 3:

Nama : Roberth Kurniawan Ruslak Hammar.

TTL : Larat Kota, 18 Agustus 1965.

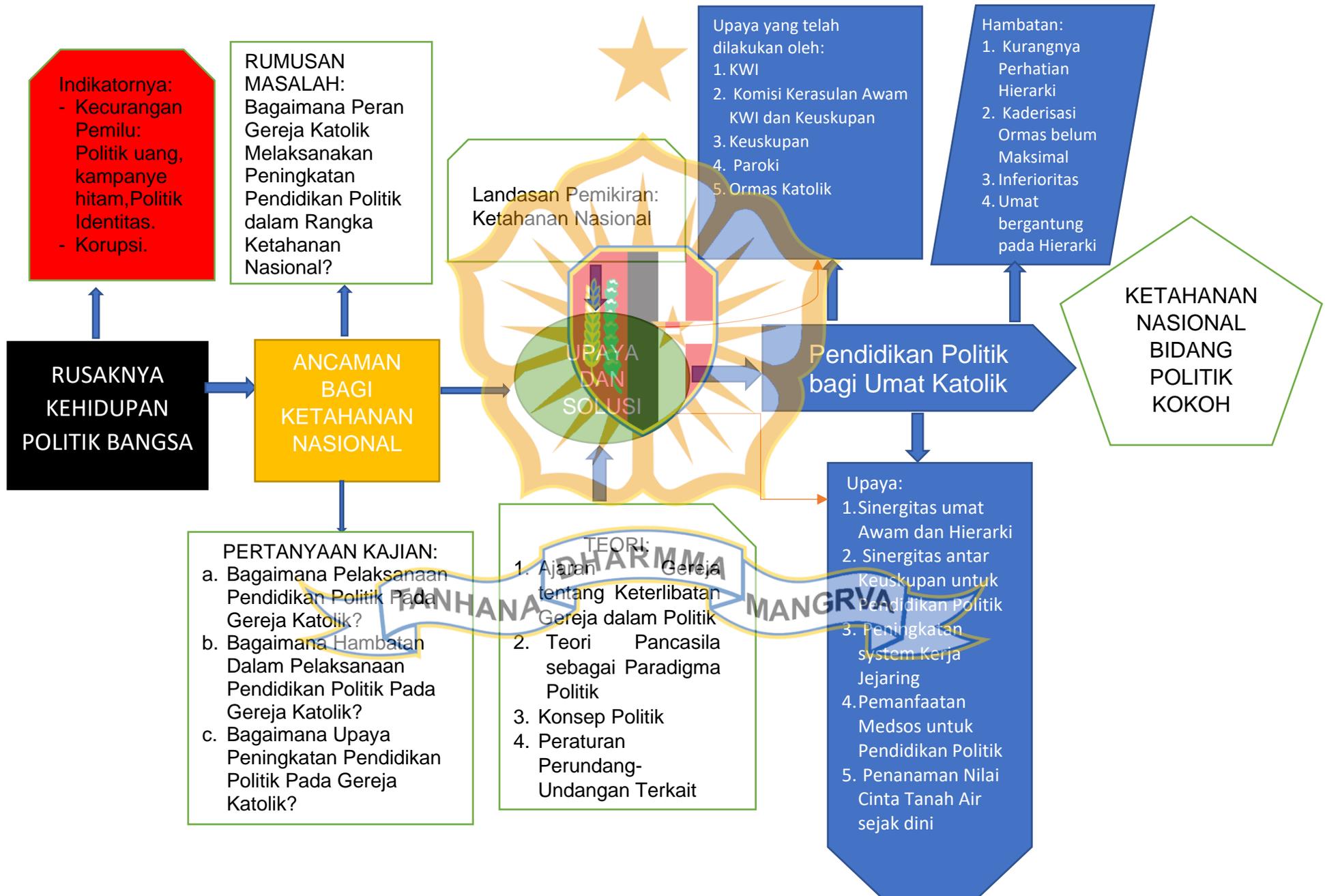
Jabatan : Tokoh Umat Katolik Manokwari.

Alamat : Jl. Simponi Rindu Wirsi, Nomor 11, Manokwari.



ALUR PIKIR

PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK PADA GEREJA KATOLIK DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap & Gelar : Gregorius Sainudin Dudy, S.Ag., S.H., M.H.

Nama Panggilan : Gregor

Tempat, Tanggal Lahir : Ponu, 11 Agustus 1975

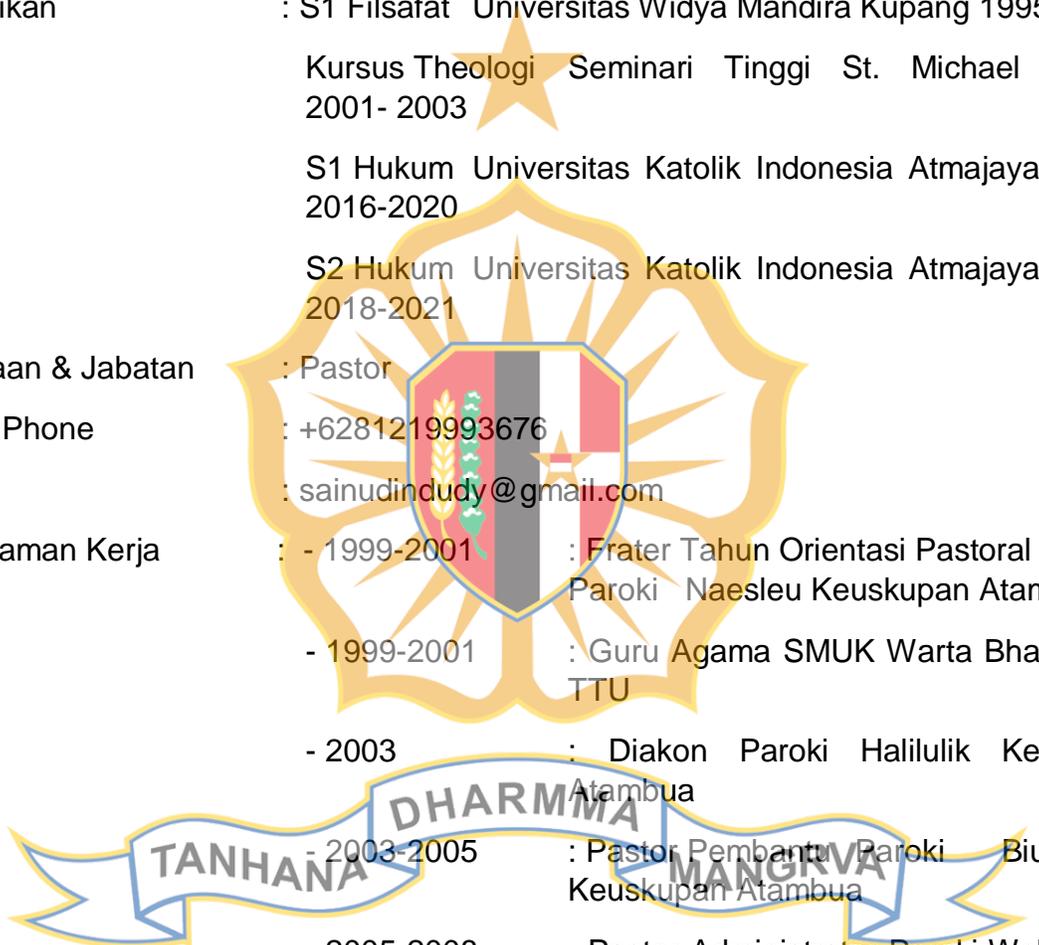
Pendidikan : S1 Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang 1995-2000  
Kursus Theologi Seminari Tinggi St. Michael Kupang 2001- 2003  
S1 Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta 2016-2020  
S2 Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta 2018-2021

Pekerjaan & Jabatan : Pastor

Mobile Phone : +6281219993676

Email : sainuindudy@gmail.com

Pengalaman Kerja : - 1999-2001 : Frater Tahun Orientasi Pastoral Paroki Naesleu Keuskupan Atambua  
- 1999-2001 : Guru Agama SMUK Warta Bhakti Kefat-TTU  
- 2003 : Diakon Paroki Halilulik Keuskupan Atambua  
- 2003-2005 : Pastor Pembantu Paroki Biudukfoho Keuskupan Atambua  
- 2005-2008 : Pastor Administrator Paroki Webriamata Keuskupan Atambua  
- 2009-2011 : Dosen STIPAS Kupang di Atambua  
- 2008-2015 : Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian & Pastoral Migran-Perantau Keuskupan Atambua



- 2008-2013 : Anggota Tim Ekonomi Keuskupan Atambua-Bappeda Kab. Belu
- 2009 : Ketua Relawan Pengawas Pemilu Panwaslu Kab. Belu
- 2012-2014 : Anggota Pokti TP Atambua CU Kasih Sejahtera Atambua
- 2012-2015 : Sekertari UNIO Imam Projo Keuskupan Atambua
- 2014-2015 : Komite Kredit TP Atambua CU Kasih Sejahtera Atambua
- 2013-Sekarang : Moderator Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Atambua
- 2020-Sekarang : Pastor Pembantu Paroki Sadi Keuskupan Atambua
- 2021-2024 : Anggota Pengurus Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia

